



EDISI
SEPTEMBER
Vol. 151
2022



BULETIN STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG &
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APUPPT)



G20
INDONESIA
2022

ISSN: 89997



RINGKASAN EKSEKUTIF

September 2022

2.434.910
laporan yang diterima oleh PPATK

↓ **-0,91%** (m-to-m)
↑ **19,63%** (y-on-y)



2.125.173
LTKL



291.410
LTKT



7.454
LTKM



10.170
LTPBJ



529
LPUT



174
LPT

	LTKL	LTKT	LTKM	LTPBJ	LPUT	LPT
(m-to-m)	-1,7%	4%	2,3%	41,6%	-24,3%	16,0%
(y-on-y)	19,1%	23%	-10,4%	59,5%	0,0%	815,8

Catatan:

Pembawaan uang tunai berdasarkan waktu transaksi

81

Hasil Analisis (HA)

m-to-m: **44,6%**
y-on-y: **35%**

↑ **95,5%** (m-to-m)

↑ **95,5%** (y-on-y)

HA Proaktif

43

HA Inquiry

38

↑ **11,8%** (m-to-m)

— **0%** (y-on-y)

37

Informasi Hasil Analisis (IHA)

2

HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1

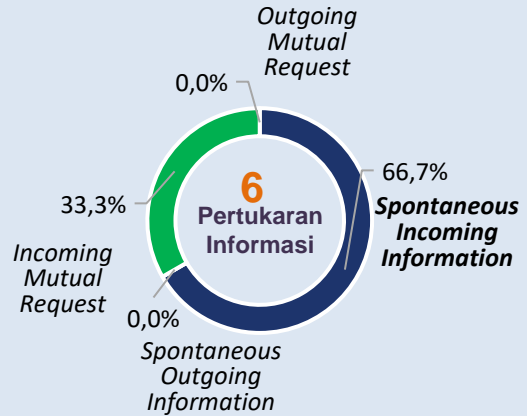
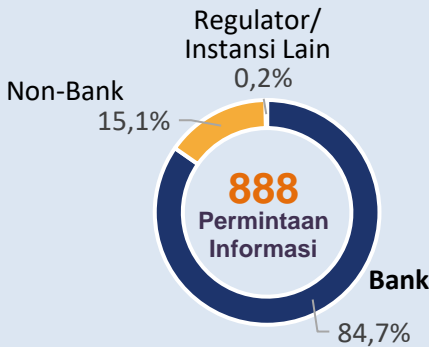
Hasil Pemeriksaan (HP) / Informasi Hasil Pemeriksaan (IHP)

RINGKASAN EKSEKUTIF



September 2022

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang September 2022, PPATK melakukan 888 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (752 informasi/84,7%).

Dari 6 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, **Spontaneous Incoming Information** (4 informasi/66,7%) merupakan jenis informasi yang banyak dipertukarkan.

Keterangan Ahli 11

Pada September 2022 terdapat penambahan 11 keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kepolisian (5 keterangan/45%).

Pengaduan Masyarakat (DUMAS) 55

Dari 55 pengaduan yang diterima pada September 2022, 24 pengaduan dari lembaga dan 31 pengaduan berasal dari individu.

2 MoU

Terdapat 2 penambahan penandatanganan MoU antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada bulan September 2022.


17 Audit

PPATK melakukan 17 kegiatan audit sepanjang September 2022. 4 Audit dilakukan pada PJK dan 13 Audit dilakukan pada PBJ.

RINGKASAN EKSEKUTIF



Januari - September 2022

20.082.157
laporan yang diterima oleh PPAK  **10,9% (c-to-c*)**



17.429.809
LTKL



2.524.080
LTKT



65.641
LTKM



61.605
LTPBJ



1022
LPT

c-to-c:* **9,1%**

23,4%

14,1%

111,4%

961,1%

Keterangan: *) Perubahan c-to-c merupakan perbandingan Jan – Sep 2022 terhadap Jan-Sep 2021



643
Hasil Analisis (HA)
Perubahan c-to-c*
32,6%

HA Proaktif

279

 **56,7% (c-to-c*)**

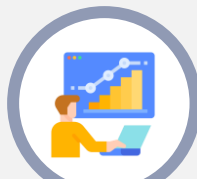
HA Inquiry

364

 **18,6% (c-to-c*)**



307
Informasi Hasil Analisis (IHA)



9
Hasil Pemeriksaan (HP) / Informasi Hasil Pemeriksaan (IHP)



60
HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

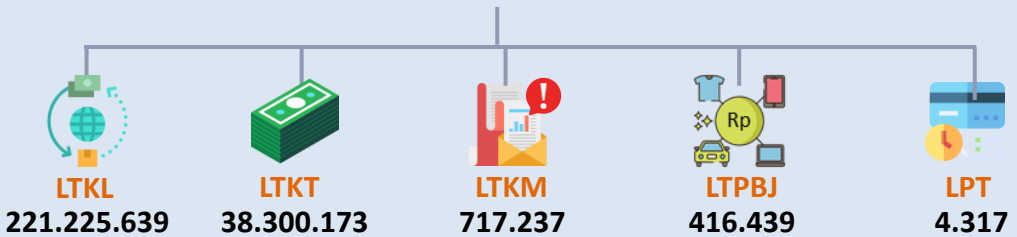
RINGKASAN EKSEKUTIF



2003 s.d. Sep 2022

260.663.239

laporan yang diterima sejak pemberlakuan
Undang-undang TPPU/TPPT



Periode 2003 s.d. 2010: 8.695.347 Laporan

Pelaporan berdasarkan periode 2003 s.d 2010 berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2002 dan UU Nomor 25 Tahun 2003.



Periode 2011 s.d. Sep 2022: 251.967.892 Laporan

Pelaporan periode setelah 2010 berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010.



Jakarta, Oktober 2022
Kepala PPAK

IVAN YUSTIAVANDANA

DAFTAR ISI

BULLETIN

ISSN : 89997

STATISTIK

Volume 151/THN XI/2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

SISTEM PELAPORAN

LAPORAN TRANSAKSI

- 8 LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN (LTKM)
- 17 LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI
(LTKT)
- 22 LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI
(LPUT)
- 24 LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG
DAN JASA (LTPBJ)
- 27 LAPORAN TRANSFER DANA DARI/KE
LUAR NEGERI (LTKL)
- 32 LAPORAN PENUNDAAN
TRANSAKSI (LPT)

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

- 36 HASIL ANALISIS (HA)
- 41 HASIL PEMERIKSAAN (HP)
- 43 PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PJK/PBJ
TERKAIT HASIL ANALISIS
- 45 PENGADUAN MASYARAKAT

LAIN - LAIN

- PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU 46
- KETERANGAN AHLI 48
- AUDIT 50
- PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU 53
- NOTA KESEPAHAMAN (MOU) 55
- PENDIDIKAN & PELATIHAN APUPPT 59



ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 8 TAHUN 2010
DAN UNDANG – UNDANG NO. 9 TAHUN 2013

SISTEM PELAPORAN



MIGRASI SISTEM

Sebagai upaya **optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelaporan** oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK telah mengembangkan aplikasi goAML sebagai sarana untuk penyampaian pelaporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelaporan penyedia jasa keuangan. Sistem ini merupakan **migrasi** dari Aplikasi *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS). Sehubungan dengan hal tersebut, **PPATK telah mengadakan peluncuran atau go – live sistem pelaporan APUPPT GoAML pada 1 Februari 2021.**



REGULASI

- **Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021** Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri melalui Aplikasi goAML bagi **Penyedia Jasa Keuangan**
- **Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021** Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi **Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain**
- **Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021** Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi **Profesi**



PERUBAHAN

Perubahan signifikan yang terjadi, bahwa pada sistem goAML:

- Untuk 1 (satu) laporan yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor **dapat berisi lebih dari 1 (satu) transaksi.**
- Pihak Terlapor di dalam laporan menjadi **Individu Terkait (Involved Persons), Entitas Terkait (Involved Entities) dan Akun Terkait (Involved Account)** serta di dalam 1 (satu) laporan tersebut **dapat berisi lebih dari 1 (satu) Pihak Terkait.**
- Pihak Pelapor **diwajibkan untuk mengisi indikasi tindak pidana** pada pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan **minimal 1 (satu).**



PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN



UU No 8 Tahun 2010

Pasal (1) Ayat 5

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

■ Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dimulai **sejak Januari Tahun 2003**

■ Dilaporkan oleh **Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta Profesi** melalui sistem goAML



Perka PPATK Nomor 1 Tahun 2021

Kewajiban Pelaporan – Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

1. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
2. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 meliputi:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme.

Teknis Pelaporan – Pasal 34 Ayat (1)

“PJK wajib mengisi laporan:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;
- c. Aktivitas Mencurigakan akibat Pemutusan Hubungan Usaha;
- d. Aktivitas Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;
- e. Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Permintaan PPATK.”

Perka PPATK Nomor 2 Tahun 2021

Kewajiban Pelaporan – Pasal 2 Ayat (1) huruf (b)

- “PBJ wajib menyampaikan kepada PPATK laporan:
- b. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan”

Teknis Pelaporan – Pasal 26 Ayat (1) huruf (b) dan (c)

“PBJ wajib mengisi laporan:

- b. Transaksi Keuangan Mencurigakan atas permintaan PPATK; dan
- c. Aktivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa atau pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”

Perka PPATK Nomor 3 Tahun 2021

Kewajiban Pelaporan – Pasal 2 Ayat (1)

- “Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK”

Teknis Pelaporan – Pasal 26 Ayat (1)

“Profesi wajib mengisi laporan:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Aktivitas Mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”



PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN




**SEPTEMBER
2022**

Jumlah LTKM yang
disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK
7.454 LTKM

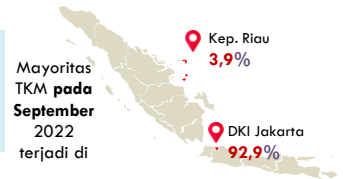
Pelaporan LTKM bulan ini
↑ 2,3%
Dibandingkan bulan
Agustus 2022 (m-to-m)

Pelaporan LTKM bulan ini
↓ -10,4%
Dibandingkan bulan
September 2021 (y-to-y)



Rata-rata penerimaan
373 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)

Indikasi Tindak Pidana
mayoritas pada **September
2022: Penipuan**
31,1%



Tabel 1

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan*)

Laporan	2021					2022								
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	7.466	7.933	6.165	5.670	9.810	5.261	5.853	6.367	5.550	7.068	6.399	6.407	6.695	
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	2	24	399	11	55	36	14	33	22	31	89	12	12	
LTKM - Atas Permintaan PPATK	704	409	388	532	235	672	1.033	509	266	297	654	740	649	
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	2	5	12	2	1	1	3	2	3	1	3	0	3	
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	144	138	165	164	101	66	89	95	93	111	81	124	95	
Total	8.318	8.509	7.129	6.379	10.202	6.036	6.992	7.006	5.934	7.508	7.226	7.283	7.454	

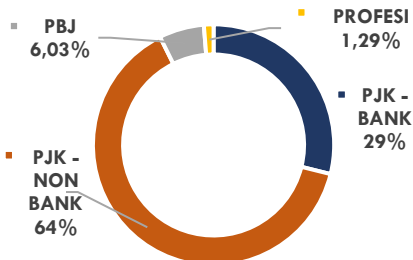
Catatan:

*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Peraturan PPATK No 1 Tahun 2021

Grafik 1

**Distribusi Jumlah Kumulatif
Penerimaan LTKM**

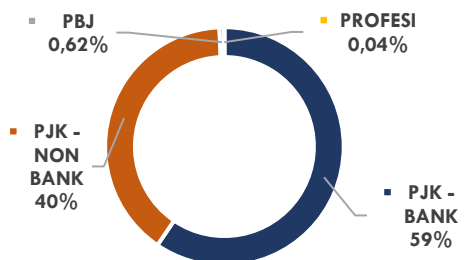
Tahun 2022 (Jan s.d Sept 2022)



Grafik 2

**Distribusi Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor**

Tahun 2022 (Jan s.d Sept 2022)





Tabel 2

Jumlah Kumulatif LTKM & Pihak Pelapor per Kelompok Industri*

Kelompok Industri*)	Laporan				Pihak Pelapor
	2021		2022		Jan 2003 s.d. Sept 2022
	Jan - Sept	Total 2021	Jan - Sept	Tahun 2022 (s.d Sept 2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PJK - BANK	30.603	42.184	39.054	383.360	134
Bank Umum	30.414	41.909	38.846	378.607	105
Bank Asing	833	1.108	684	11.443	12
Bank Campuran	358	529	311	5.836	6
Bank Milik Negara	4.953	7.764	8.624	119.025	4
Bank Pembangunan Daerah	669	836	912	25.539	26
Bank Swasta	23.601	31.672	28.315	216.764	57
Bank Perkreditan Rakyat	189	275	208	4.753	29
PJK - NON BANK	26.827	37.123	26.150	333.204	296
Perusahaan Pembiayaan	1.112	1.507	1.221	59.988	37
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	8.327	12.201	3.281	54.487	42
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	21	29	24	139	3
Perusahaan Efek	300	443	489	932	28
Manajer Investasi	94	120	51	171	5
Pasar Modal**)	247	247	0	11.398	0
Kustodian	0	0	5	5	2
Wali Amanat	0	4	0	4	0
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	0	0	0	0	0
Pedagang Valuta Asing	7.718	11.076	8.348	146.452	106
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	0	0	0	0	0
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	759	1.040	618	1.970	7
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	9	13	11	339	2
Pegadaian	37	44	41	85	1
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	713	1.171	1.061	5.013	16
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	7.490	9.222	10.949	52.159	45
Perusahaan Modal Ventura	0	0	0	2	0
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	0	0	0	0
Lembaga Keuangan Mikro	0	0	0	0	0
Lembaga Pembiayaan Ekspor	0	0	0	3	0
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	0	6	51	57	2
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0
PBJ	88	223	408	631	28
PROFESI	8	13	29	42	6
Total	57.526	79.543	65.641	717.237	464

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021)

***) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai dengan sistem pelaporan GoAML menurut UU Nomor 8 Tahun 2010

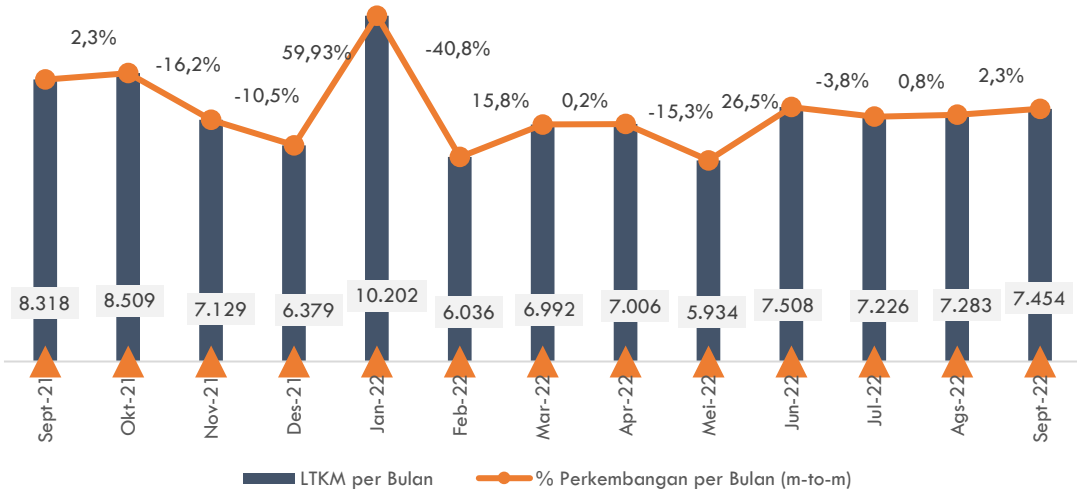
Tabel 3
Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri ^{*)}	2021												2022											
	2019	2020	2021	Sept	Oktober	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)								
PJK - BANK	40.206	38.616	42.184	4.378	3.450	4.311	3.820	3.414	3.166	4.311	4.175	3.449	4.888	5.042	4.502	5.207								
Bank Umum	39.537	38.306	41.909	4.357	3.434	4.284	3.777	3.376	3.148	4.295	4.145	3.437	4.877	5.001	5.378	5.189								
Bank Asing	1.265	1.159	1.108	77	96	79	100	58	66	80	115	70	96	66	68	65								
Bank Campuran	306	297	529	85	60	45	66	27	60	39	30	33	20	38	42	22								
Bank Milik Negara	14.195	8.090	7.764	929	561	1.234	1.016	777	746	852	868	717	1.154	1.227	1.226	1.057								
Bank Pembangunan Daerah	1.810	1.566	836	54	43	50	74	51	34	57	51	50	240	173	167	89								
Bank Swasta	21.961	27.194	31.672	3.212	2.674	2.876	2.521	2.463	2.242	3.267	3.081	2.567	3.367	3.497	3.875	3.956								
Bank Perkreditan Rakyat	669	310	275	21	16	27	43	38	18	16	30	12	11	41	24	18								
PJK - NON BANK	38.381	29.441	37.123	3.881	5.015	2.764	2.517	6.750	2.789	2.619	2.801	2.446	2.606	2.127	1.812	2.200								
Perusahaan Pembinaan	3.765	1.657	1.807	125	123	130	142	123	106	227	143	96	122	165	121	118								
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Plabing Asuransi	3.363	3.532	12.201	1.972	3.062	564	248	275	604	318	151	490	334	303	456	350								
Dana Penun Lembaga Keuangan	38	20	29	0	4	4	4	0	1	2	7	0	4	2	5	3								
Perusahaan Efek	0	0	443	36	42	46	55	36	46	71	63	38	80	35	66	54								
Manajer Investasi	0	0	120	17	1	2	23	3	0	2	24	0	7	1	9	5								
Pasar Modal ^{**)}	1.820	1.886	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Kustodian	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1								
Wali Amanat	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Pedagang Valuta Asing	22.455	13.269	11.076	1.028	1.139	1.160	1.059	1.025	948	981	1.141	991	1.033	866	605	758								
Penyelenggara Alar Pembayaran Menggunakan Kartu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	58	238	1.040	25	78	74	129	38	73	48	196	17	138	21	24	63								
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	172	21	13	0	2	1	1	1	4	0	1	1	1	0	0	5								
Pegadaian	0	0	44	2	3	2	2	4	4	2	8	1	1	7	6	8								
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	155	354	1.171	93	128	192	138	154	171	96	193	106	101	58	70	112								
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	6.552	8.464	9.222	583	437	589	706	5.091	833	872	873	706	756	662	442	714								
Perusahaan Modal Ventura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Perusahaan Pembinaan Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Lembaga Keuangan Mikro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Lembaga Pembiayaan Ekspor	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	0	0	6	0	0	0	6	0	1	0	1	0	1	0	29	6								
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
PBJ	0	0	223	54	44	52	39	38	81	61	24	25	12	56	65	46								
PROFESI	0	0	13	5	0	2	3	0	0	1	6	14	2	1	4	1								
Total	78.587	68.057	79.543	8.318	8.509	7.129	6.379	10.202	6.036	6.992	7.006	5.934	7.508	7.226	7.283	7.454								

*) Terdapat penyusutan Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem GoAML (mulai Februari 2021)

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

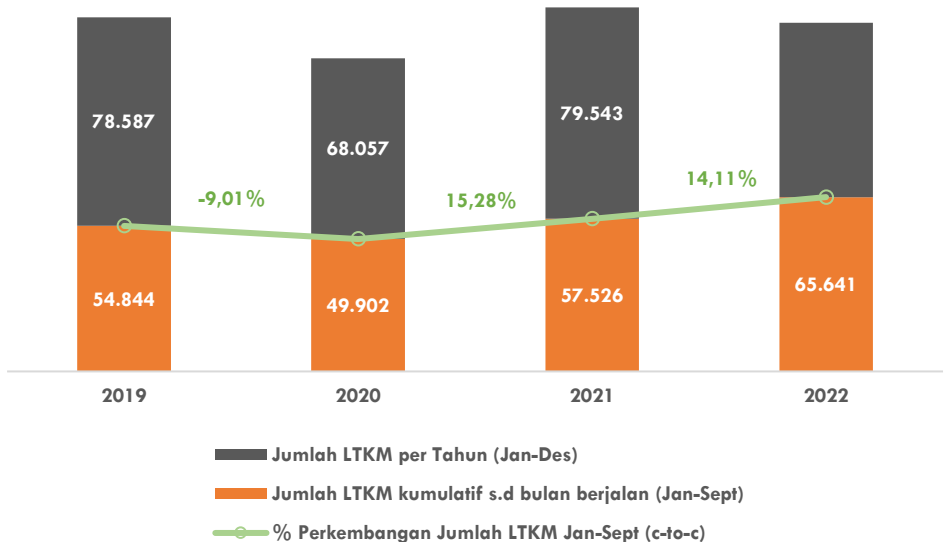
Grafik 3
Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM
per bulan dalam 1 tahun terakhir
September 2021 s.d September 2022



Catatan:

month-to-month (m-to-m) : perbandingan jumlah pada bulan tertentu dibandingkan dengan jumlah bulan sebelumnya

Grafik 4
Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM
Kumulatif hingga Bulan Berjalan dalam 3 tahun terakhir
2019 s.d September 2022



Catatan:

cumulative-to-cumulative (c-to-c): perbandingan jumlah kumulatif hingga bulan berjalan (Jan s.d. Sept) pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah kumulatif Jan s.d. Sept pada tahun sebelumnya

Grafik 5
Rata-Rata Penerimaan LTKM per bulan
Selama 4 tahun terakhir
Tahun 2019 – 2022 (s.d September 2022)



INDIKATOR DALAM PELAPORAN LTKM

Pihak Pelapor wajib menyampaikan penyebab transaksi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan memilih **INDIKATOR** dengan kode:

- a. INDTPA : 26 Indikasi Tindak Pidana Asal sesuai UU No 8 Tahun 2010
- b. POLA : Tidak sesuai profil pengguna jasa
- c. HINDAR : Menghindari Pelaporan
- d. BATAL : Penggunaan Hasil Tidak Pidana
- e. MINTA : Permintaan PPAK
- f. PUTUS : Permutasan Hubungan Usaha
- g. CBCC : LPUTLB
- h. TUNDA : Penundanaan Transaksi
- i. TEROR : TP Pendanaan Terorisme
- j. LT : Indikator LT
- k. AUDIT : Audit Kepatuhan & Audit Khusus
- l. INQUIRY : Permintaan Apgakum
- m. HENTI : Penghentian Transaksi
- n. KOREKSI : Koreksi Laporan

- Sesuai dengan Lampiran Peraturan PPAK No 1 Tahun 2021, bahwa Pihak Pelapor wajib menyertakan pilihan indikator yang menjadi penyebab transaksi untuk dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (jenis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, LTKM Atas Permintaan PPAK dan Laporan Aktivitas Mencurigakan Pemutusan Hubungan Usaha). Pilihan tersebut terdapat pada kelompok indikator dengan kode INDTPA, POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, AUDIT, INQUIRY. Sementara itu, khusus untuk **pilihan indikator INDTPA wajib diisi minimal 1 (satu)**.
- Namun, kewajiban pilihan indikator INDTPA tidak berlaku untuk LTKM Terkait Pendanaan Terorisme dan LTKM Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme. Kedua jenis LTKM tersebut diwajibkan untuk memilih indikator pada kelompok TEROR sehingga tidak terdapat indikator INDTPA.

Dengan adanya **kewajiban pilihan minimal 1 (satu) indikator TPA pada pelaporan TKM**, yang selanjutnya menyebabkan **kemungkinan perbedaan jumlah laporan per indikator TPA** dengan **parameter lain (Provinsi dan Kelompok)**, istilah yang digunakan oleh Tim Statistik PPAK menjadi **"Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal pada LTKM"**.

Tabel 4
Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asas per Bulan pada LTKM

Tindak Pidana Asas ^(*)	2021												2022											
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	Sept (5)	Okta (6)	Nov (7)	Des (8)	Jan (9)	Feb (10)	Mar (11)	Apr (12)	Mei (13)	Jun (14)	Jul (15)	Ags (16)	Sept (17)								
Cukai ^(**)	0	0	252	17	38	55	13	1	0	0	9	18	4	5	8	3								
Di Bidang Kehutanan	28	19	66	8	16	5	3	4	1	8	2	2	6	6	15	3								
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	3	3	79	15	27	5	7	2	3	3	6	2	6	4	2	3								
Di Bidang Lingkungan Hidup	71	44	168	12	16	19	35	12	12	124	31	35	50	52	45	28								
Di Bidang Pasar Modal	52	443	1.096	67	97	94	147	132	82	140	179	51	119	69	75	80								
Di Bidang Perasuransi	21	8	740	69	48	91	89	98	449	174	74	388	223	164	174	202								
Di Bidang Perbankan	571	606	3.068	238	353	306	374	380	360	448	342	240	379	443	360	411								
Di Bidang Perpajakan	1.481	1.602	4.641	423	404	542	730	544	482	821	735	550	548	549	708	610								
Kepabeperangan ^(**)	0	0	167	25	10	18	9	18	10	7	9	19	11	11	5	11								
Korupsi	4.580	3.895	5.764	579	975	476	334	314	187	210	274	227	392	411	564	427								
Narkotika	1.257	1.678	1.770	141	128	145	86	75	77	131	92	156	370	204	151	228								
Pemalsuan Uang	6	6	47	4	6	0	1	2	3	3	3	1	1	7	1	1								
Penculikan	2	1	35	1	3	0	0	2	3	0	3	0	1	0	1	0								
Pencurian	67	287	164	26	57	4	9	16	14	14	24	31	112	14	7	17								
Penggelapan	959	776	10.468	2.103	2.303	685	719	664	738	657	634	380	494	664	292	208								
Penipuan	9.801	13.338	25.026	2.725	2.493	2.217	1.957	2.515	1.929	2.428	2.315	1.721	2.444	2.433	2.496	2.392								
Penyelundupan Migran	1	4	8	3	0	1	2	5	10	4	4	0	0	1	3	0								
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	0	17	4	3	1	4	8	8	5	4	0	5	1	0	0								
Penyelundupan Barang ^(**)	27	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Penyelundupan	686	391	3.671	516	761	226	118	133	76	75	91	70	109	89	103	94								
Perdagangan Orang	274	33	235	6	9	9	5	5	3	2	18	15	2	40	1	1								
Perdagangan Senjata Gelap	1	0	34	14	9	0	0	1	4	0	2	0	3	0	1	2								
Perjudian	2.907	1.086	3.446	686	305	337	253	262	206	414	785	696	1.121	976	1.159	1.499								
Prostitusi	8	9	68	8	11	4	5	8	3	1	3	2	1	1	3	0								
Psikotropika	4	2	131	14	30	34	4	7	10	4	0	0	7	1	1	0								
Terorisme	660	1.122	1.321	24	56	426	54	97	63	19	45	43	45	127	15	24								
Indikasi Tindak pidana lain yang dicantumkan pidana 4 tahun atau lebih Tidak teridentifikasi	818	764	15.700	1.252	1.816	1.557	1.586	5.209	1.660	1.684	1.762	1.443	1.492	1.370	1.360	1.457								
Total	78.587	68.057	82.184	8.980	9.974	7.257	6.544	10.514	6.393	7.376	7.446	6.089	7.945	7.642	7.550	7.701								

Catatan:

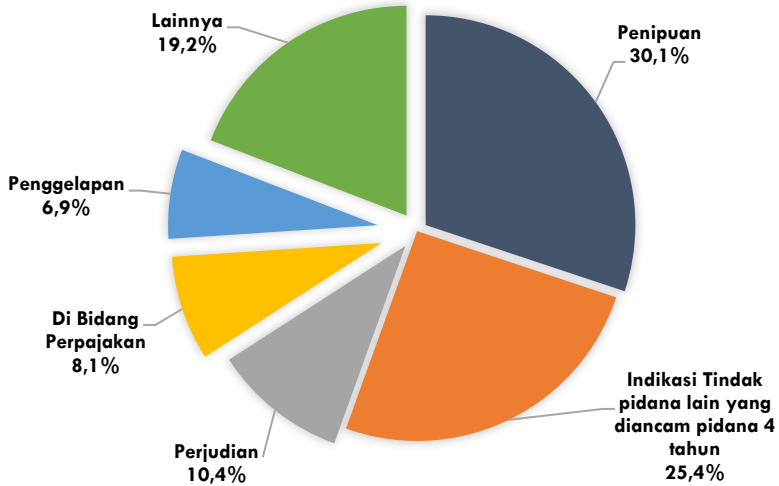
*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asas setelah adanya implementasi GoAML

**) Tindak Pidana ini pada implementasi GRIPS dicantumkan sebagai Penyelundupan Barang dan mulai pada implementasi GoAML akan didefinisikan kembali menjadi TP Cukai dan TP Kepabeperangan.

Tabel 5.
Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2021												2022				
	2019	2020	2021	Sept	Oktr	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Aceh	561	386	34	0	0	1	3	1	1	0	0	0	1	1	0	10	
Sumatera Utara	2.619	2.902	521	25	68	38	31	6	36	19	10	9	43	58	19	0	
Sumatera Barat	374	176	48	1	0	0	0	1	2	2	20	102	6	4	0	0	
Sumatera Selatan	1.338	1.487	252	6	4	11	8	1	6	4	10	2	10	2	4	6	
Bengkulu	105	62	19	1	2	2	3	1	1	3	1	0	0	0	3	3	
Jambi	413	496	67	2	5	9	2	2	2	3	8	9	10	5	4	3	
Riau	675	647	61	1	0	3	1	0	3	3	0	0	1	4	5	0	
Kepulauan Riau	4.637	7.170	11.318	464	1.629	1.848	564	560	482	477	507	562	516	347	243	287	
Lampung	974	605	250	14	13	22	28	26	14	8	8	4	8	26	26	17	
Kep Bangka Belitung	158	150	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Banten	2.896	2.252	613	30	32	38	39	23	84	43	38	27	98	103	45	28	
DKI Jakarta	37.173	32.900	62.954	7.607	6.767	5.076	5.509	9.462	5.325	6.233	6.254	5.223	6.549	6.482	6.668	6.923	
Jawa Barat	9.439	6.637	1.410	82	12	4	76	46	39	42	56	45	63	61	63	64	
Jawa Tengah	2.328	1.785	253	13	3	8	6	9	8	18	29	2	0	13	23	9	
Jawa Timur	5.124	3.243	474	18	9	22	20	8	24	49	11	9	15	16	28	43	
DI Yogyakarta	573	396	94	15	3	6	4	2	0	3	2	1	7	7	3	3	
Bali	870	749	274	4	8	3	39	4	11	17	17	10	7	33	20	8	
Nusa Tenggara Barat	337	178	53	2	1	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	4	
Nusa Tenggara Timur	132	71	39	0	1	1	0	0	0	2	3	0	0	0	16	4	
Maluku	174	101	14	5	1	0	3	0	0	8	2	0	1	2	4	0	
Maluku Utara	74	77	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Kalimantan Barat	1.161	598	62	3	1	0	1	5	3	2	4	2	3	3	9	7	
Kalimantan Timur	1.754	1.406	133	2	1	0	2	6	2	1	4	1	9	2	2	4	
Kalimantan Tengah	404	257	71	3	0	3	4	0	1	0	4	0	6	2	2	3	
Kalimantan Selatan	836	603	81	1	4	0	2	0	0	3	4	1	60	34	35	1	
Kalimantan Utara	153	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sulawesi Utara	382	203	50	4	2	0	1	5	0	7	2	0	1	15	0	1	
Sulawesi Selatan	1.615	1.194	169	6	1	0	13	6	17	13	13	5	8	3	7	2	
Sulawesi Tengah	455	392	71	1	0	1	2	2	0	0	3	0	4	0	2	2	
Sulawesi Tenggara	195	375	26	2	0	2	7	1	2	7	1	0	0	0	3	0	
Sulawesi Barat	19	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gorontalo	70	61	2	0	0	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	
Papua	465	408	100	5	2	1	1	0	0	7	0	0	19	15	5	3	
Papua Barat	104	43	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	78.587	68.057	79.543	8.318	8.509	7.129	6.379	10.202	6.036	6.992	7.006	5.934	7.508	7.226	7.283	7.454	

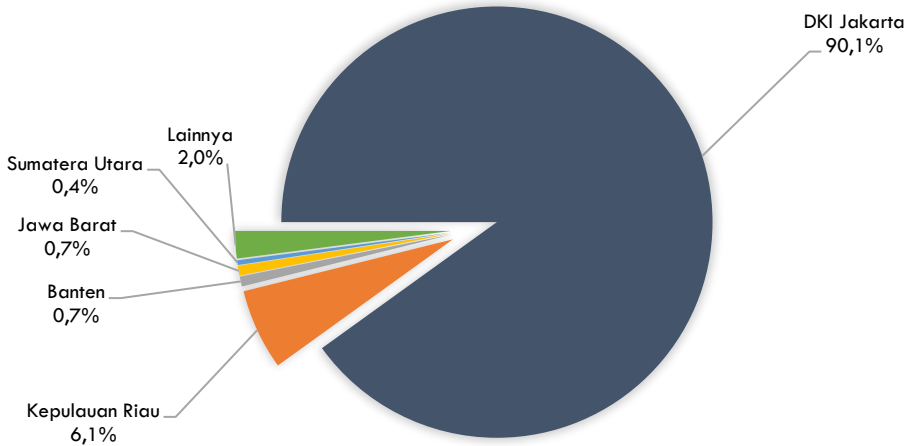
Grafik 6
Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM
per Tindak Pidana Asal
Tahun 2022 (Jan s.d Sept 2022)



Catatan:

*) Lainnya: Tindak Pidana selain 5 Tindak Pidana yang disebutkan di atas

Grafik 7
Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif
LTKM per Provinsi
Tahun 2022 (Jan s.d Sept 2022)



Catatan:

*) Lainnya: Provinsi selain 5 Provinsi yang disebutkan di atas



PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

LTKT

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI



📅 Laporan Transaksi Keuangan Tunai mulai efektif diterima PPATK sejak Januari Tahun 2003



SEPT
2022

Jumlah LTKT yang disampaikan
Pihak Pelapor kepada PPATK
291.410 LTKT

Pelaporan LTKT bulan September

↑ **4%**

Dibandingkan bulan Agustus
2022 (m-to-m)

Pelaporan LTKT bulan September

↑ **23%**

Dibandingkan bulan September
2021 (y-to-y)

Jumlah LTKT Kas Masuk yang
disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPATK
164.017 LTKT

Jumlah LTKT Kas Keluar yang
disampaikan Pihak Pelapor
kepada PPATK
127.393 LTKT



Pihak Pelapor LTKT selama tahun 2022 (s.d September)



TAHUN
2022



496
Bank



167
Non-Bank

UU Nomor 8 Tahun 2010



Pasal 1 angka 6

Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam



Pasal 9 huruf f menyatakan “Penyedia Jasa Keuangan wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit **Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari Kerja.”

Tabel 6

Jumlah Kumulatif LTKT & Pihak Pelapor per Kelompok Industri

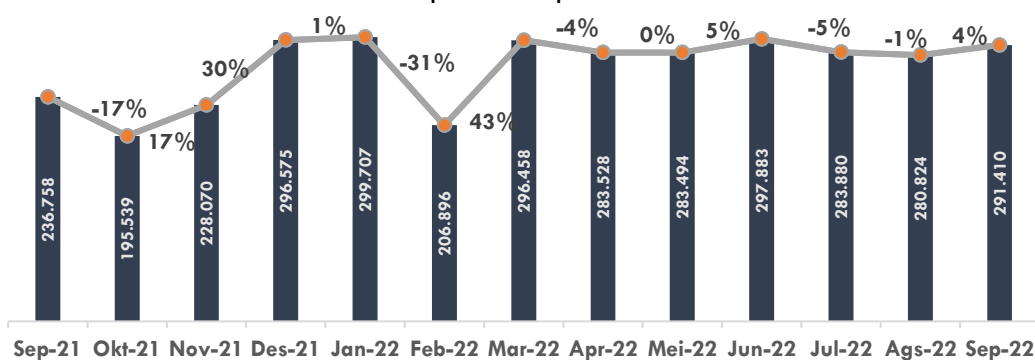
Kelompok Industri*	LAPORAN				PIHAK PELAPOR
	2021		2022	Jan 2003 s.d.	
	Jan s.d Sept	Total 2021	Jan s.d. Sept	Sept 2022	Tahun 2022 (s.d. Sept 2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bank	2.026.104	2.738.099	2.500.992	38.066.331	496
Bank Umum	2.023.131	2.733.833	2.496.882	38.006.132	107
Bank Perkreditan Rakyat	2.973	4.266	4.110	60.199	389
Non Bank	20.036	28.225	23.088	233.842	167
Perusahaan Pembiayaan	45	60	46	1.041	8
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	0	0	0	1.396	0
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0	0	0	0	0
Perusahaan Efek	22	26	0	26	1
Manajer Investasi	0	0	0	44	0
Pasar Modal**	0	0	0	87	0
Kustodian	0	0	0	0	0
Wali Amanat	0	0	0	0	0
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	0	0	0	3	0
Pedagang Valuta Asing	15.685	22.453	18.361	190.803	128
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	0	0	0	0	0
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	0	0	0	0	0
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	474	642	393	1.634	5
Pegadaian	2.462	3.347	3.078	9.151	1
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	0	0	0	0	0
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	1.348	1.697	1.210	29.657	24
Perusahaan Modal Ventura	0	0	0	0	0
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	0	0	0	0
Lembaga Keuangan Mikro	0	0	0	0	0
Lembaga Pembiayaan Ekspor	0	0	0	0	0
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran	0	0	0	0	0
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis	0	0	0	0	0
Total	2.046.140	2.766.324	2.524.080	38.300.173	663

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem GoAML (mulai Februari 2021).

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

Grafik 8
Perkembangan Jumlah LTKT yang Diterima oleh PPAK
dalam 1 tahun terakhir
Sept 2021 s.d Sept 2022



Tabel Z
Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri*	2022															
	2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Bank	3.096.589	2.700.178	2.738.099	234.236	193.483	225.102	293.410	296.780	204.802	293.618	280.887	281.456	295.576	281.083	277.798	288.992
Bank Umum	3.091.514	2.695.643	2.733.833	233.856	193.136	224.694	292.872	296.260	204.454	293.128	280.344	281.075	295.092	280.602	277.326	288.601
Bank Perkreditan Rakyat	5.075	4.535	4.266	380	347	408	538	520	348	490	543	381	484	481	472	391
Non Bank	33.420	38.420	28.225	2.522	2.056	2.968	3.165	2.927	2.094	2.840	2.641	2.038	2.307	2.797	3.026	2.418
Perusahaan Pembiayaan	21	21	60	3	7	3	5	2	6	10	5	15	4	2	0	2
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusahaan Efek	0	0	26	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manajer Investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasar Modal**	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kustodian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wali Amanat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perpasan sebagai penyelenggara jasa giro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	24.593	26.546	22.453	2.118	1.735	2.471	2.562	2.211	1.761	2.121	1.955	1.701	1.822	2.237	2.556	1.997
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan	0	512	642	73	49	70	49	63	44	50	40	41	59	34	22	40
Pegadaian	0	2.519	3.347	210	205	307	373	513	195	522	508	153	276	349	294	268
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang/komoditi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusahaan Modal Ventura	8.800	8.800	1.697	114	59	115	175	138	88	137	133	128	146	175	154	111
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Keuangan Mikro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga Pembiayaan Ekspor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.130.009	2.738.598	2.766.324	236.758	195.539	228.070	296.575	299.707	206.896	296.458	283.528	283.494	297.883	283.880	280.824	291.410

Catatan:

*) Terdapat penyusutan Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem GoAML (mulai Februari 2021).

***) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

Tabel 8

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri*	2022***	
	Sept	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi
(1)	(2)	(3)
Bank	162.821	281.825.716.524.721
Bank Umum	162.654	281.664.181.981.450
Bank Perkreditan Rakyat	167	161.534.543.271
Non Bank	1.196	4.560.655.227.964
Perusahaan Pembiayaan	2	1.905.127.400
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	0	0
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0	0
Perusahaan Efek	0	0
Manajer Investasi	0	0
Pasar Modal**	0	0
Kustodian	0	0
Wali Amanat	0	0
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	0	0
Pedagang Valuta Asing	924	4.307.967.329.913
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	0	0
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	0	0
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	23	15.886.375.300
Pegadaian	147	115.977.770.378
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	0	0
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	100	118.918.624.973
Perusahaan Modal Ventura	0	0
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	0
Lembaga Keuangan Mikro	0	0
Lembaga Pembiayaan Ekspor	0	0
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	0	0
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	0	0
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	0	0
Total	164.017	286.386.371.752.685

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem GoAML (mulai Februari 2021).

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

***) Nominal dalam bentuk rupiah.

Tabel 9

Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Keluar PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri*	2022***	
	September	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi
(1)	(2)	(3)
Bank	126.171	520.245.557.250.279
Bank Umum	125.947	520.005.785.894.835
Bank Perkreditan Rakyat	224	239.771.355.444
Non Bank	1.222	4.507.145.771.957
Perusahaan Pembiayaan	0	0
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	0	0
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0	0
Perusahaan Efek	0	0
Manajer Investasi	0	0
Pasar Modal**	0	0
Kustodian	0	0
Wali Amanat	0	0
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	0	0
Pedagang Valuta Asing	1.073	4.392.318.604.452
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	0	0
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	0	0
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	17	10.155.396.500
Pegadaian	121	95.716.670.000
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	0	0
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	11	8.955.101.005
Perusahaan Modal Ventura	0	0
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	0
Lembaga Keuangan Mikro	0	0
Lembaga Pembiayaan Ekspor	0	0
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	0	0
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	0	0
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	0	0
Total	127.393	524.752.703.022.236

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem GoAML (mulai Februari 2021).

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

***) Nominal dalam bentuk rupiah.



DIREKTORAT
JENDERAL
BEA DAN CUKAI

LPUT



LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI



UU No 8 Tahun 2010

Pasal 34 Ayat 1

“Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

Pasal 35 Ayat 1

“Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Perka PPAK Nomor 1 Tahun 2022

Pasal 2 Ayat 2

Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
- Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau
- Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan



Laporan Pembawaan Uang Tunai dari DJBC dimulai sejak Januari Tahun 2006



September
2022



513

LPUT Laporan
Biasa (LPUTLB)



13

Pelanggaran
LPUT



3

LPUT
Mencurigakan



Tahun 2022 (s.d September 2022)



1813

LPUT Laporan
Biasa (LPUTLB)



125

Pelanggaran
LPUT



4

LPUT
Mencurigakan



Lokasi Pelaporan

Selama tahun 2022 (s.d September 2022) **Pelanggaran LPUT** terbanyak terjadi di **Soekarno Hatta**

Tabel 10

Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan per Bulan

Lokasi Pelaporan	2019	2020	2021	2021				2022*								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Batam	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11	86	213	288	468	513
Soekarno Hatta	5	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	196	0
Tanjung Balai Karimun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ngurah Rai Denpasar	2	84	0	0	0	0	0	0	3	11	8	5	1	3	0	0
Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entikong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuala Namu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atambua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Total	7	190	1	0	0	0	1	0	3	11	19	91	215	297	664	513

Tabel 11

Jumlah Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan per Bulan

Lokasi Pelaporan	2019	2020	2021	2021				2022*								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Batam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soekarno Hatta	92	26	12	0	0	7	1	3	3	3	5	5	15	13	20	9
Tanjung Balai Karimun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ngurah Rai Denpasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	13	8	2	1	2	2
Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entikong	0	0	5	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Kuala Namu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0
Juanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Atambua	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3	2
Total	92	28	17	0	1	7	1	6	3	7	19	14	18	17	28	13

Tabel 12

Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2019	2020	2021	2021				2022*								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Batam	1.174	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soekarno Hatta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Tanjung Balai Karimun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Ngurah Rai Denpasar	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balikpapan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entikong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuala Namu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atambua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.174	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0

Catatan:

Pembawaan uang tunai berdasarkan waktu transaksi.

*) Terdapat pengkinian jumlah data.



PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

LTPBJ

LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA



UU No 8 Tahun 2010

Pasal 17 ayat (1)

"Pihak Pelapor meliputi:

a. penyedia jasa keuangan:

1. bank;
2. perusahaan pembiayaan;
3. perusahaan asuransi dan perusahaan piutang asuransi;
4. dana pensiun lembaga keuangan;
5. perusahaan efek;
6. manajer investasi;
7. kustodian;
8. wali amanat;
9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. pedagang valuta asing;
11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. pegadaian;
15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. perusahaan properti/agen properti;
2. pedagang kendaraan bermotor;
3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. pedagang barang seni dan antik; atau
5. balai lelang."

Laporan Transaksi dari PBJ mulai efektif diterima PPATK sejak Mei 2012



SEPT
2022

Jumlah LTPBJ yang disampaikan pada September 2022
10.170 Laporan

Jumlah PBJ Pelapor kepada PPATK tahun 2022 hingga September 2022
528 Pihak Pelapor

Pelaporan LTPBJ Sept 2022
↑41,6%
Dibandingkan bulan Ags 2022 (m-to-m)

Pelaporan LTPBJ Sept 2022
↑59,5%
Dibandingkan bulan Sept 2021 (y-to-y)



TAHUN
2022

Pada Tahun 2022 (**s.d Sept 2022**), laporan Transaksi dari PBJ yang diterima PPATK:



24.602 laporan
(39,9%)
Perusahaan Properti



32.293 laporan
(52,4%)
Pedagang Kendaraan Bermotor



2.885 laporan
(4,7%)
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia



Perka PPATK No 2 Tahun 2021

Pasal 2 Ayat (1)

"PBJ wajib menyampaikan ke PPATK laporan:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.0000 (lima ratus juta rupiah);"



1.825 laporan
(3%)
Balai Lelang dan KPKNL



0 laporan
(0%)
Pedagang Barang Seni/Antik

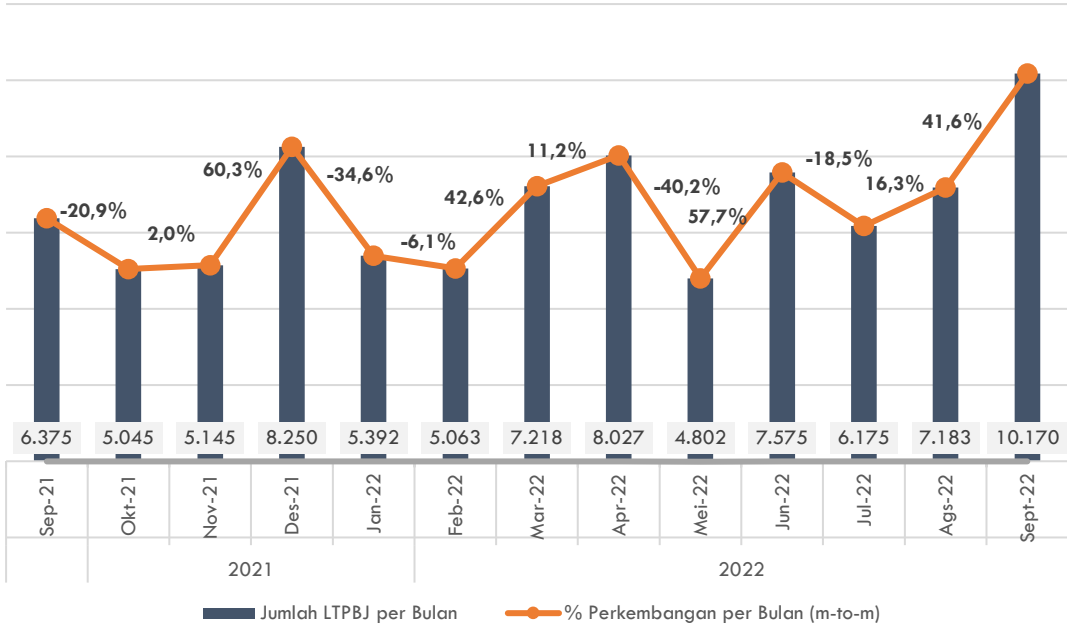
Tabel 13
Jumlah Kumulatif Laporan & Pihak Pelapor per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Laporan						Pihak Pelapor Tahun 2022 (Jan s.d Sept 2022)
	2021		2022		Mei 2012 s.d Sept 2022		
	Jan s.d Sept (2)	Total 2021 (3)	Jan s.d Sept (4)	Total 2022 (5)			
Perusahaan Properti	11.446	18.575	24.602	213.320	304		
Pedagang Kendaraan Bermotor	11.351	20.007	32.293	173.558	174		
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	4.789	6.845	2.885	20.979	5		
Balai Lelang dan KPKNL	1.561	2.160	1.825	8.516	45		
Barang Seni/Antik	0	0	0	4	0		
Tidak terklasifikasi	0	0	0	62	0		
Total	29.147	47.587	61.605	416.439	528		

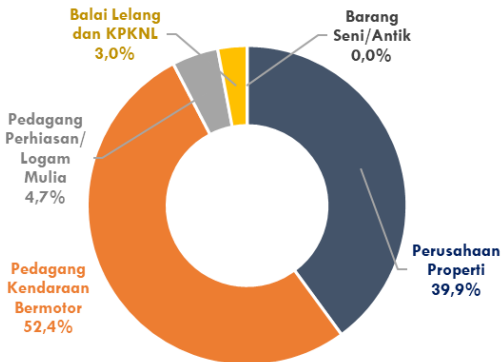
Tabel 14
Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2021												2022				
	2019	2020	2021	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Perusahaan Properti	16.436	12.657	18.575	2.765	1.921	1.995	3.213	2.399	2.072	2.647	3.332	1.853	3.304	1.959	2.340	4.696	
Pedagang Kendaraan Bermotor	18.593	14.375	20.007	2.443	1.946	2.412	4.298	2.435	2.659	4.041	4.216	2.560	3.597	3.701	4.240	4.844	
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	3.114	3.488	6.845	960	1.003	575	478	399	191	359	276	250	290	382	325	413	
Balai Lelang dan KPKNL	975	1.719	2.160	207	175	163	261	159	141	171	203	139	384	133	278	217	
Barang Seni/Antik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tidak terklasifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	39.118	32.239	47.587	6.375	5.045	5.145	8.250	5.392	5.063	7.218	8.027	4.802	7.575	6.175	7.183	10.170	

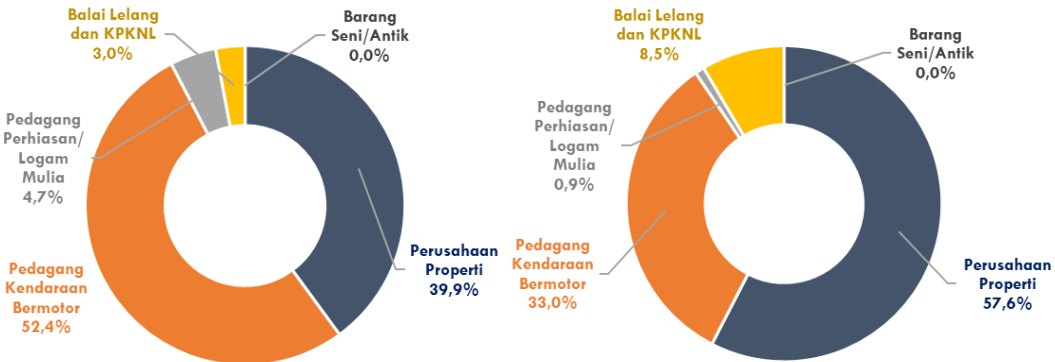
Grafik 9
Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ
per bulan dalam 1 tahun terakhir
September 2021 s.d September 2022



Grafik 10
Distribusi Jumlah Penerimaan LTPBJ
Tahun 2022 (Jan s.d Sept 2022)



Grafik 11
Distribusi Jumlah Pihak Pelapor PBJ
Tahun 2022 (Jan s.d Sept 2022)





PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

LTKL

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI



"Pelaporan dimulai sejak Januari 2014 oleh pihak pelapor yaitu Penyedia Jasa Keuangan: Bank, Penyelenggara E-Money dan/atau E-Wallet dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang."

**September
2022**

2.125.173

Laporan Transaksi Keuangan Transfer dana dari/ke luar negeri (LTKL)

↓ **-1,7% (m-to-m)**

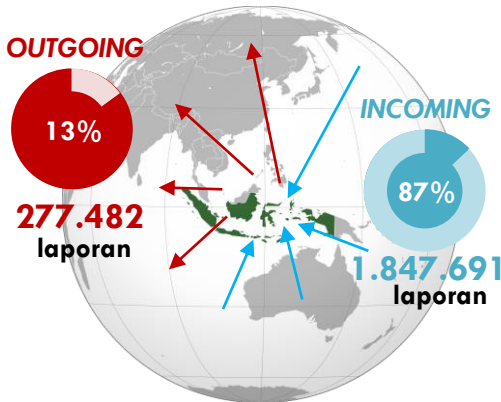
Sept 2022 terhadap Ags 2022

↑ **19,1% (y-on-y)**

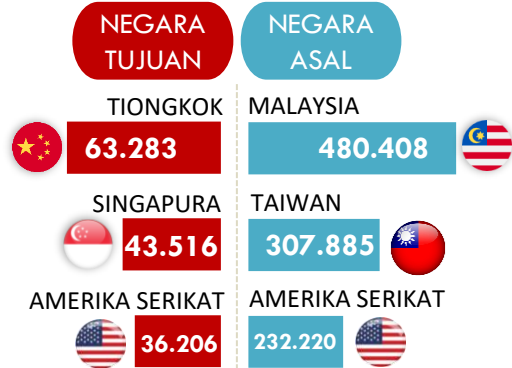
Sept 2022 terhadap Sept 2021

Jenis Transaksi: ● NON-SWIFT ● SWIFT ● KUPU*)

*) Kegiatan Usaha Pengiriman Uang



Tiga besar jumlah LTKL negara tujuan dan asal transfer dana



Nilai Rata-Rata Transfer Dana per laporan pada **Sept 2022**

Rp2,0 miliar
Outgoing

Rp348 juta
Incoming

17.429.809 LTKL ↑ **9,11%**
Sepanjang Jan-Sept 2022
Terhadap Jan-Sept 2021



Perka PPATK No 1 Tahun 2021

Pasal 9 ayat (3) menyatakan "Penyedia Jasa Keuangan yang wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri ke PPATK merupakan bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank".



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal 1 angka 4

"Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri"

Tabel 17
Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi

Jenis Transaksi	2019	2020	2021	2022												Tahun 2022 (s.d Sept 2022)	KUMULATIF Jan 2014 s.d Sept 2022	
	(2)	(3)	(4)	Sept	Oktr	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	(18)	(19)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Dari Luar Negeri	29.204.854	26.777.726	18.982.996	1.538.089	1.590.460	1.715.339	1.673.454	1.491.123	1.548.731	1.624.206	1.587.122	1.591.547	1.865.071	1.741.295	1.884.403	1.847.691	15.181.189	195.350.006
SWIFT	5.211.445	4.452.587	5.139.554	489.116	450.996	461.729	516.881	473.612	425.797	521.937	504.220	516.335	504.220	479.003	458.308	544.605	4.473.547	43.173.392
NON-SWIFT	14.314.009	14.404.770	13.351.872	1.046.799	1.137.625	1.176.294	1.154.884	1.014.350	1.111.767	1.098.812	1.035.781	1.073.778	1.359.296	1.260.588	1.424.458	1.301.019	10.679.849	97.207.821
KUPU	9.679.400	9.720.369	491.570	2.174	1.839	77.316	1.689	3.161	11.167	3.457	1.611	1.434	1.555	1.704	1.637	2.067	27.793	54.968.793
Ke Luar Negeri	3.701.097	2.772.091	2.722.641	245.774	236.388	245.640	269.422	238.339	196.000	276.885	238.495	211.334	270.017	263.079	276.989	277.482	2.448.620	25.875.633
SWIFT	2.803.703	2.377.020	2.578.896	234.184	225.856	230.622	256.859	227.680	186.370	265.420	230.121	204.028	261.989	255.470	268.635	269.701	2.169.414	22.307.763
NON-SWIFT	672.006	208.410	92.026	8.048	6.867	8.280	9.011	7.247	7.387	8.761	6.175	5.498	5.915	5.590	6.022	5.396	57.991	2.296.268
KUPU	225.318	186.661	51.719	3.542	3.665	6.738	3.552	3.412	2.243	2.704	2.199	1.808	2.113	2.019	2.332	2.385	21.215	1.271.602
Total	32.905.951	29.549.817	21.705.637	1.783.863	1.826.848	1.960.979	1.942.876	1.729.462	1.744.731	1.901.091	1.825.617	1.802.881	2.135.088	2.004.374	2.161.392	1.742.939	17.429.809	221.225.639

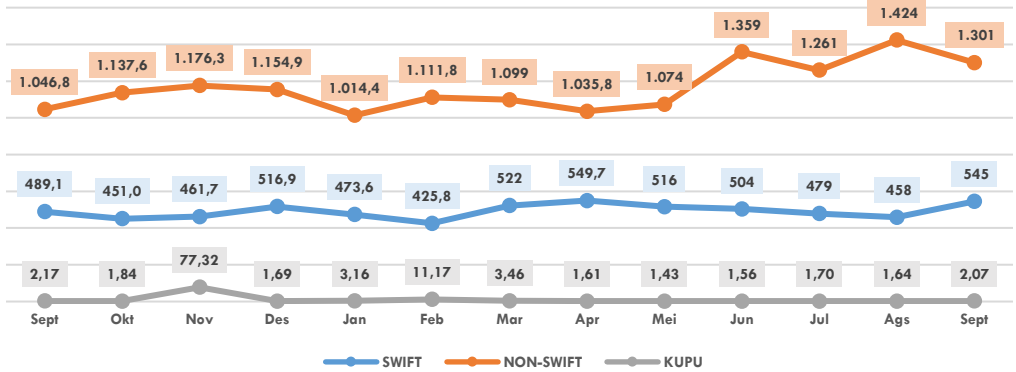
Tabel 18
Jumlah Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri dalam Triliun Rupiah Berdasarkan Jenis Transaksi

Jenis Laporan	2019	2020	2021	2022												Tahun 2022 (s.d Sept 2022)	KUMULATIF Jan 2014 s.d Sept 2022	
	(2)	(3)	(4)	Sept	Oktr	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	(18)	(19)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Dari Luar Negeri	5.268	4.731	9.848	520	450	549	597	585	471	626	633	542	724	596	633	642	5.451	47.517
SWIFT	4.906	4.068	5.079	482	399	510	556	550	435	590	608	516	686	560	584	610	5.139	41.687
NON-SWIFT	301	608	2.572	35	47	36	37	29	26	24	19	21	33	31	43	27	252	3.570
KUPU	61	54	2.197	3	4	4	4	6	10	11	5	5	5	5	5	5	60	2.260
Ke Luar Negeri	5.046	3.990	5.437	412	757	414	900	410	448	489	500	484	1.364	767	600	551	5.614	40.835
SWIFT	4.890	3.760	5.116	383	732	377	864	389	419	458	480	464	1.343	734	566	532	5.383	40.022
NON-SWIFT	142	218	291	26	23	35	31	19	27	28	16	17	18	30	31	16	203	755
KUPU	14	12	30	4	3	2	5	3	3	4	3	4	3	3	4	3	28	58
Total	10.314	8.721	15.286	932	1.208	964	1.498	996	920	1.115	1.133	1.026	2.088	1.363	1.233	1.193	11.065	88.353

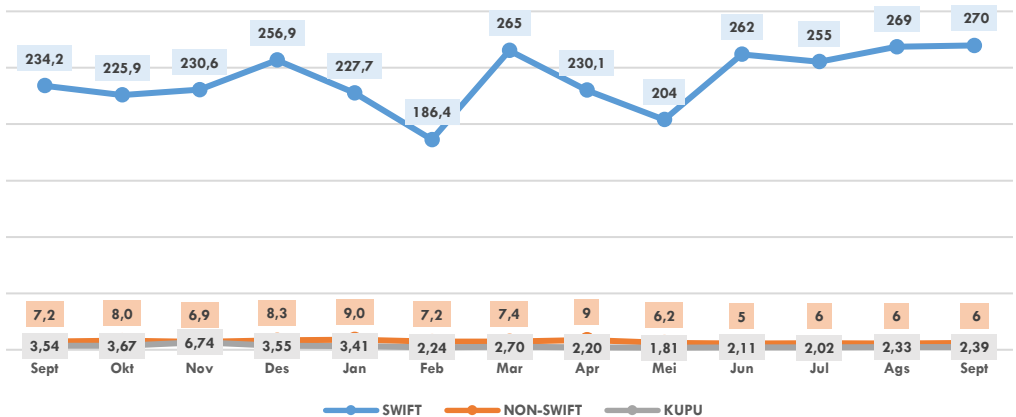
Tabel 19
Jumlah Pihak Pelapor LTKL pada Sept 2022

Pihak Pelapor (1)	Jumlah Entitas (2)
Bank	71
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	2
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	57
Total	130

Grafik 12
Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana Dari Luar Negeri per bulan dalam 1 tahun terakhir Sept 2021 s.d. Sept 2022 (dalam Ribuan)



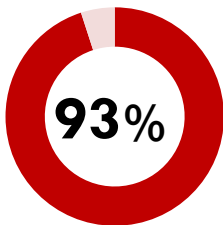
Grafik 13
Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana Ke Luar Negeri per bulan dalam 1 tahun terakhir Sept 2021 s.d. Sept 2022 (dalam Ribuan)



Tabel 20

Daftar 20 Negara **Tujuan** Utama Transfer Dana berdasarkan LTKL selama Sept 2022

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	63.283
Singapura	43.516
Amerika Serikat	36.206
Hong Kong	19.387
Australia	14.362
Malaysia	10.843
Jepang	10.807
Korea Selatan	9.742
Inggris	9.467
Taiwan	7.064
India	7.010
Jerman	6.125
Thailand	5.902
Prancis	3.881
Belanda	3.125
Italia	3.097
Kanada	3.040
Arab Saudi	2.505
Vietnam	2.320
Filipina	1.821
Lainnya	19.613
TOTAL	283.116

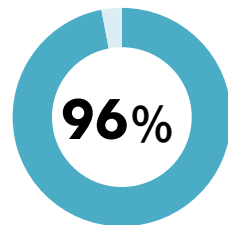


Proporsi jumlah LTKL **OUTGOING** di Sept 2022 yang ditujukan pada 20 Negara tujuan utama transfer dana.

Tabel 21

Daftar 20 Negara **Asal** Utama Transfer Dana berdasarkan LTKL selama Sept 2022

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	480.408
Taiwan	307.885
Amerika Serikat	232.220
Singapura	180.656
Hong Kong	86.120
Arab Saudi	82.347
Korea Selatan	80.422
Jepang	76.537
Uni Emirat Arab	63.396
Australia	59.660
Inggris	32.316
Jerman	25.099
Belanda	20.332
Brunei Darussalam	19.405
Irlandia	13.531
Qatar	9.036
Swiss	8.129
Prancis	7.191
Selandia Baru	6.922
Timor Leste	5.483
Lainnya	72.494
TOTAL	1.869.589



Proporsi jumlah LTKL **INCOMING** di Sept 2022 yang berasal dari 20 Negara utama asal tranfer dana.

Tabel 22

Daftar 20 Negara Tujuan dengan Jumlah Nominal Transaksi Terbanyak selama Sept 2022

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	173.456
Amerika Serikat	103.780
Tiongkok	62.385
Jepang	30.192
Hong Kong	26.797
Inggris	18.282
Korea Selatan	10.649
Malaysia	10.511
Taiwan	8.942
Thailand	8.446
Australia	6.467
Belanda	5.353
Prancis	3.862
Jerman	3.839
Uni Emirat Arab	3.781
India	3.159
Swiss	2.259
Vietnam	1.458
Arab Saudi	1.366
Belgia	1.173

Tabel 23

Daftar 20 Negara Asal dengan Jumlah Nominal Transaksi Terbanyak selama Sept 2022

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Amerika Serikat	218.798
Singapura	170.960
Hong Kong	37.700
Jepang	25.464
Tiongkok	20.681
Inggris	17.439
Malaysia	12.942
Korea Selatan	12.938
Taiwan	12.377
Belanda	4.111
Australia	3.498
Thailand	3.310
Uni Emirat Arab	2.906
Jerman	2.722
Prancis	2.471
Swiss	2.457
Vietnam	2.104
Filipina	2.004
Arab Saudi	1.813
Makau	1.785



PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

LPT

LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI



Laporan Penundaan Transaksi mulai efektif disampaikan kepada PPATK sejak Januari Tahun 2013



September
2022

Jumlah LPT yang disampaikan Pihak
Pelapor kepada PPATK

174 LPT



Tahun 2022
(s.d September)

Selama Tahun 2022 (s.d September
2022) terdapat

1.022 LPT

Catatan: Pencatatan berdasarkan waktu diterimanya LPT oleh PPATK.

Penundaan Transaksi 2022 (s.d September 2022)



Penundaan Transaksi dilakukan oleh
Bank Swasta (94,87%)



Jenis terlapor :
Perorangan (99%)



Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek
Materil tidak terpenuhi **(93%)**



Penundaan Transaksi mayoritas terjadi
di wilayah **DKI JAKARTA
(97%)**



Nominal dibawah **Rp100 juta
(98%)**



Alasan Penundaan **(89%)**:

- (1) melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- (2) memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan dari hasil tindak pidana
- (3) diduga menggunakan dokumen palsu



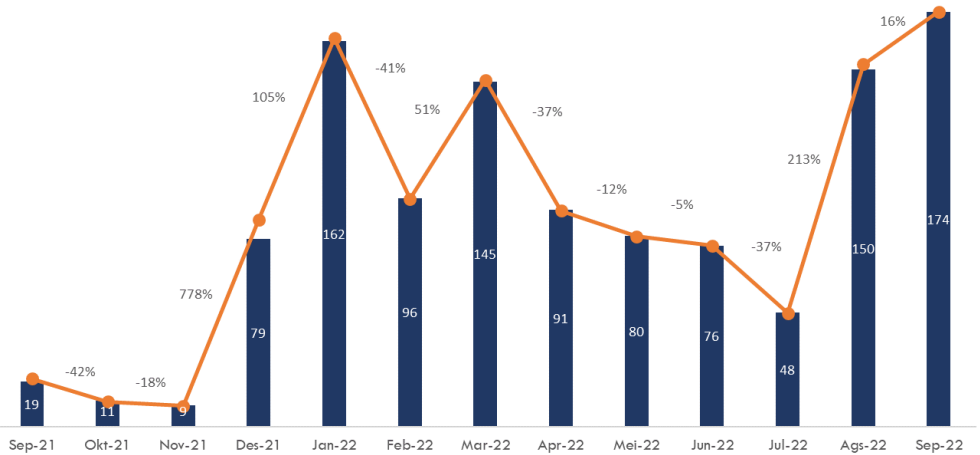
UU No 8 Tahun 2010
Pasal 26 ayat (1)

1. Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan.
2. Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.

6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

Grafik 14
Jumlah LPT yang Diterima PPATK
per bulan selama 1 tahun terakhir
Sept 2021 hingga Sept 2022



Tabel 22
Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Pemenuhan Aspek Formil dan Materil

Pemenuhan Aspek Formil dan Aspek Materil	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aspek Formil dan Aspek Materil terpenuhi	6	11	62	8	4	5	27	2	0	5	1	0	0	2	3	2
Aspek Formil terpenuhi, namun Aspek Materil tidak terpenuhi	69	47	130	10	7	4	52	158	96	139	90	77	74	44	114	171
Aspek Formil tidak terpenuhi, namun Aspek Materil terpenuhi	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Aspek Formil dan Aspek Materil tidak terpenuhi	4	3	2	0	0	0	0	2	0	1	0	3	1	2	33	1
Total	79	63	196	19	11	9	79	162	96	145	91	80	76	48	150	174

Catatan:

- (1) Aspek formil terpenuhi bila Berita Acara/Pernyataan telah dilakukan penundaan transaksi dibuat tidak lebih dari 24 jam setelah transaksi ditunda.
- (2) Aspek materil terpenuhi bila transaksi yang ditunda bernilai Rp100 juta atau lebih.

Tabel 23
Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Kategori Nominal Transaksi yang Ditunda

Kategori Nominal Transaksi	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dibawah 100 juta	62	49	149	10	7	4	73	160	96	140	90	80	75	46	147	172
Rp100 Juta s.d. Rp1 Milyar	11	6	27	4	3	3	3	2	0	3	1	0	1	0	2	1
Diatas Rp1 Milyar	6	8	20	5	1	2	3	0	0	2	0	0	0	2	1	1
Total	79	63	196	19	11	9	79	162	96	145	91	80	76	48	150	174

Tabel 24
Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Kelompok Industri ^{*)}	2019			2020			2021			2022											
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
BANK	67	54	178	17	10	9	78	162	96	143	89	80	75	48	150	172					
Bank Umum	67	54	178	17	10	9	78	162	96	143	89	80	75	48	150	171					
Bank Asing	1	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Bank Campuran	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Bank Milik Negara	14	7	23	4	2	1	2	22	1	7	3	1	1	0	2	2					
Bank Pembangunan Daerah	3	1	8	0	0	0	0	8	0	0	1	1	0	2	0	1					
Bank Swasta	40	36	141	13	8	6	76	132	95	136	85	78	74	46	148	168					
Bank Per Kreditan Rakyat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
NON BANK	12	9	18	2	1	0	1	0	0	2	2	0	1	0	0	2					
Perusahaan Pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Piutang Asuransi	12	7	18	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	2					
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Perusahaan Efek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Manajer Investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Pasar Modal ^{**)}	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kustodian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Wali Amanat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Perdagangan Valuta Asing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kaperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Pegadalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0					
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Perusahaan Modal Ventura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Lembaga Keuangan Mikro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Lembaga Pembiayaan Ekspor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Total	79	63	196	19	11	9	79	162	96	145	91	80	76	48	150	174					

^{*)} Terdapat penyusutan Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021).

^{**)} Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

Tabel 25

Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Transaksi yang Ditunda

Jenis Transaksi Yang Ditunda	2019	2020	2021	2021					2022							
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Transfer	11	18	21	1	1	0	1	1	2	1	2	0	1	1	1	0
Tarik/Setor Tunai	42	15	83	11	7	4	38	4	2	5	3	1	0	3	2	5
Polis Asuransi	7	4	10	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1
Remittance	2	0	4	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
SMS/Mobile Banking	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Lainnya	9	9	21	2	1	2	0	21	0	5	1	0	1	0	6	0
Tidak Teridentifikasi	5	6	38	4	0	1	23	136	92	131	83	79	74	44	141	167
Total	79	63	196	19	11	9	79	162	96	145	91	80	76	48	150	174

Tabel 26

Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan

Jenis Terlapor dan Pekerjaan Utama Terlapor Perorangan	2019	2020	2021	2021					2022							
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perorangan	76	55	160	17	9	9	76	161	95	144	90	80	76	46	150	174
Pegawai Swasta	16	20	21	1	1	3	8	24	21	25	11	5	2	3	11	25
Pengusaha/Wirawasta	35	25	88	12	7	5	39	38	26	41	14	12	15	11	21	37
Pedagang	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PNS	5	3	6	0	0	0	0	5	19	0	18	3	4	5	6	5
Ibu Rumah Tangga	7	1	12	3	1	1	3	11	6	18	6	3	5	4	12	28
Professional	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	5	0
PEPs	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	2
Buruh	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
TKW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Pelajar/Mahasiswa	1	1	1	0	0	0	0	10	6	5	4	5	8	0	6	11
Pengajar/Dosen	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1
Belum/Tidak Bekerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak Teridentifikasi	4	2	26	0	0	0	21	56	33	34	51	50	40	21	86	64
Pegawai BUMN	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Korporasi	3	8	36	2	2	0	3	1	1	1	1	0	0	2	0	0
Total	79	63	196	19	11	9	79	162	96	145	91	80	76	48	150	174

Tabel 27

Jumlah LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Alasan Penundaan Transaksi

Alasan Penundaan Transaksi	2019	2020	2021	2021					2022							
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pertimbangan (1) dan (2)	4	4	8	5	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1	0	1
Pertimbangan (1) dan (3)	1	1	54	10	0	0	36	32	0	0	0	0	0	12	0	0
Pertimbangan (2) dan (3)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pertimbangan (1) saja	13	8	37	0	1	3	2	8	0	0	2	0	2	1	3	4
Pertimbangan (2) saja	44	31	23	0	6	3	4	2	1	9	3	1	0	3	5	0
Pertimbangan (3) saja	3	6	40	0	2	1	35	7	2	3	0	0	0	0	0	0
Pertimbangan (1); (2) dan (3)	14	13	15	2	2	2	2	108	91	130	86	78	72	31	142	165
Total	79	63	178	18	11	9	79	162	94	142	91	79	75	48	150	170

Catatan:

- (1) Pengguna Jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- (2) Pengguna Jasa memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- (3) Pengguna Jasa diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

Terdapat 4 penundaan transaksi pada bulan September yang alasan penundaannya tidak tertera pada Berita Acara Penundaan



HA

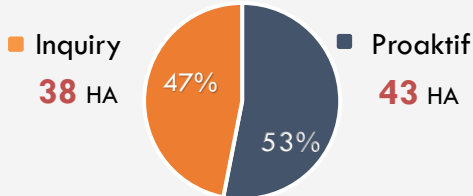


PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

HASIL ANALISIS

Sept 2022

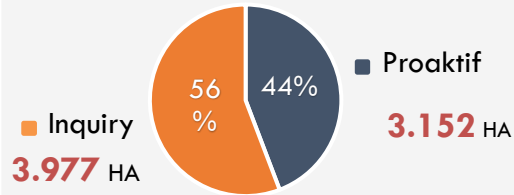
81 HA



↑44,6% (Sept 2022 terhadap Ags 2022)
 ↑35% (Sept 2022 terhadap Sept 2021)

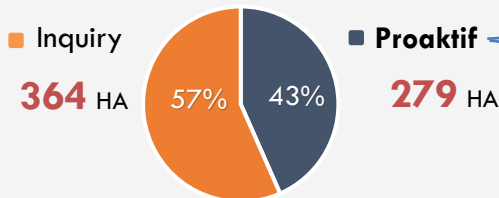
Jan 2003 s.d. Sept 2022

7.129 HA



Tahun 2022 (Jan s.d Sept 2022)

643 HA



↑32,6% (Jan-Sept'22 dibanding Jan-Sept'21)

Mayoritas pihak terlapor adalah **Perorangan** (84% atau 233 HA)

Lokus terbanyak adalah **DKI Jakarta** (33% atau 91 HA)



UU No.8 Tahun 2022 Pasal 44 Ayat 1

"Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

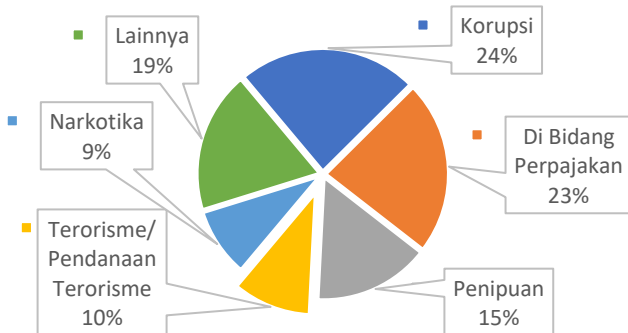
- a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
- d. berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
- e. meminta informasi kepada Pihak Pelapor
- f. berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- g. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- h. menerima laporan dan/atau informasi dari
- i. masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;"

- j. meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. meminta penyedia jasa keuangan untuk
- m. menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- n. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- o. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- p. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik."



HA berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2022 (s.d Sept 2022) didominasi **Korupsi** sebanyak **153 HA** (24%)

Grafik 15
Jumlah HA berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2022 (s.d Sept 2022)



Terkait Terorisme

Pada **tahun 2022 (s.d. Sept 2022)**, jumlah HA terkait dengan **dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme** sebanyak **10% (60 HA)**, yang terdiri dari: **39 HA Proaktif** dan **21 HA Inquiry**.

Sejak **Januari 2003 s.d. Sept 2022**, jumlah seluruh HA yang telah disampaikan kepada penyidik terkait dengan **dugaan tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme** sebanyak **418 HA**, yang terdiri dari:



278
HA Proaktif



140 HA Inquiry
(sudah termasuk *Inquiry* pada periode Januari 2007 s.d. Desember 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai HA)

Pasal 2 Ayat 2



UU No.8 Tahun 2002

Pasal 93

“Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.”

“Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme, PPATK dan instansi terkait dapat melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tabel 28
Jumlah HA Per Bulan*)

Jenis HA	2019	2020	2021	2021												2022**)				
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
PROAKTIF																				
Hasil Analisis	196	192	269	22	23	16	52	9	12	40	43	21	47	42	22	43				
INQUIRY																				
Hasil Analisis	436	331	446	38	23	47	69	16	29	48	70	29	66	34	34	38				
Total HA	632	523	715	60	46	63	121	25	41	88	113	50	113	76	56	81				

Catatan:

*) Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada Stakeholders.

**) Terdapat pengkinian jumlah data.

Tabel 29
Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

Tujuan Penyampaian HA	2019	2020	2021	2021												2022				
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
Kepolisian	259	198	360	23	23	27	57	13	22	48	58	16	53	40	26	62				
Kejaksaan	52	81	83	9	8	10	8	5	5	11	5	6	16	8	7	5				
KPK	159	104	57	2	4	7	11	0	4	6	7	6	12	6	8	8				
Ditjen Pajak	113	125	150	18	4	9	34	6	7	12	36	20	25	15	11	3				
Ditjen Bea dan Cukai	29	8	16	1	0	1	0	0	0	3	2	2	4	1	0	0				
Badan Narkotika Nasional (BNN)	20	7	22	2	2	3	5	0	2	8	3	0	1	1	2	1				
Badan Pengawas Obat dan Makanan	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI	0	0	9	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kementerian Lainnya	0	0	8	0	1	2	5	0	1	0	1	0	2	5	2	2				
Total	632	523	706	58	45	60	121	25	41	88	113	50	113	76	56	81				

Tabel 30
Jumlah Informasi HA (IHA) sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi

Instansi	2019	2020	2021	2021								2022								
				Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
KPK	87	51	20	0	1	1	2	2	1	1	2	2	1	0	1	0				
Komisi Yudisial	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1				
Kepolisian	0	0	34	0	2	2	7	0	0	1	2	0	2	1	0	0				
Direktorat Jenderal Pajak	107	65	41	9	1	4	0	0	2	10	7	3	8	5	1	2				
Badan Pemeriksa Keuangan	29	6	8	2	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	1	1				
Kementerian Keuangan	14	20	12	1	0	1	0	0	1	2	0	0	2	0	1	0				
Ditjen Bea dan Cukai	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0				
BNN	4	0	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0				
Kemenkumham	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0				
Kementerian Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2				
Otoritas Jasa Keuangan	11	9	19	8	0	8	0	1	7	9	6	5	12	8	6	21				
Kementerian Agama RI	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0				
Kementerian Kesehatan	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0				
Badan Intelijen Negara	12	36	71	5	3	3	0	4	7	15	9	2	8	8	5	1				
Kementerian Koperasi dan UKM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0				
Komisi Pengawasan Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0				
B POM	1	1	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0				
BKKBN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0				
Sekretariat Kabinet	0	0	11	1	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1				
Satgas Hak Tagih Negara	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2				
FIU Negara Lain	0	0	104	1	3	5	0	1	0	10	1	7	4	3	4	0				
PT. Pertamina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0				
Lainnya	229	101	18	0	1	1	3	0	0	0	0	1	1	1	1	5				
Total	563	349	406	28	12	40	15	11	24	57	38	25	55	36	24	37				

Catatan: Data ditampilkan adalah data mayoritas.

Tabel 31
Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Cukai	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0
Di Bidang Kehutanan	0	0	5	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	1
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di Bidang Lingkungan Hidup	5	2	8	1	1	0	2	0	2	1	1	1	0	1	0	2
Di Bidang Pasar Modal	0	3	2	0	0	1	0	1	5	3	1	0	0	0	0	0
Di Bidang Perasuransian	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Di Bidang Perbankan	9	7	12	0	1	0	1	0	0	1	5	2	1	0	0	0
Di Bidang Perpajakan	113	126	148	18	3	9	34	6	7	12	35	17	25	15	12	3
Kepabeanan	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Korupsi	253	199	75	2	5	9	12	5	12	20	15	17	36	13	15	20
Narkotika	57	30	54	6	2	6	11	0	2	11	13	0	12	3	10	5
Pemalsuan Uang	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pencurian	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Penggelapan	14	27	6	0	0	0	6	2	1	1	1	2	3	5	8	2
Penipuan	68	54	106	9	4	8	20	4	5	15	21	5	19	11	6	8
Penyelundupan Migran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelundupan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelundupan Barang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyuapan	0	6	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Perdagangan Orang	3	2	5	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2
Perdagangan Senjata Gelap	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perjudian	9	2	7	0	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	34
Prostitusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Psikotropika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terorisme /Pendanaan Terorisme	59	39	106	3	13	8	12	5	6	18	9	2	11	7	0	2
Kepabeanan dan Cukai*)	28	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	8	5	19	2	1	4	0	0	0	3	9	1	1	20	0	0
Tidak teridentifikasi	0	6	128	17	13	14	13	0	0	0	1	0	0	0	4	1
Aset Tracing	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	632	523	707	58	45	60	121	25	41	88	113	50	113	76	56	81

Catatan:

*) Analisis mengidentifikasi TP pada Hasil Analisis adalah TP Bea dan Cukai sehingga register HA disesuaikan dengan database tersebut.

Tabel 32
Jumlah HA Terorisme Berdasarkan Jenis HA

Hasil Analisis	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Proaktif	46	29	78	2	11	6	7	3	3	13	8	1	5	4	0	2
Inquiry	13	10	28	1	2	2	5	2	3	5	1	1	6	3	0	0
Total	59	39	106	3	13	8	12	5	6	18	9	2	11	7	0	2

Catatan:

*) Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada Stakeholders

Tabel 33

Jumlah HA Proaktif Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana

Wilayah	2019	2020	2021	2021					2022								
				Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Aceh	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sumatera Utara	14	5	12	0	0	1	0	0	0	1	2	2	4	1	2	0	1
Sumatera Barat	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sumatera Selatan	8	4	4	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Bengkulu	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Jambi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riau	2	1	7	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0
Kepulauan Riau	7	6	3	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	2	0	0	1
Lampung	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	0	3
Kep Bangka Belitung	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Banten	6	13	18	1	0	1	0	2	2	1	0	5	3	0	2	2	3
DKI Jakarta	64	70	98	6	4	8	7	17	4	2	15	7	4	14	14	10	21
Jawa Barat	32	30	18	0	1	0	1	8	0	3	4	7	2	6	9	4	1
Jawa Tengah	11	13	10	0	2	1	1	2	1	1	0	3	2	4	1	0	2
Jawa Timur	10	9	27	1	7	3	2	3	0	0	5	8	3	3	3	1	4
DI Yogyakarta	2	1	3	0	0	2	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
Bali	4	3	7	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Nusa Tenggara Barat	0	5	3	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	1	1	0
Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Maluku	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maluku Utara	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalimantan Barat	3	1	4	0	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Kalimantan Timur	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
Kalimantan Tengah	2	0	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Kalimantan Selatan	4	5	3	0	0	1	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	1
Kalimantan Utara	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Sulawesi Utara	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sulawesi Selatan	5	1	16	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	2	0	0	1
Sulawesi Tengah	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0
Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papua	4	3	7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	2	0	1
Papua Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lain-Lain	0	0	10	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	2
Total	196	191	265	12	21	22	14	52	9	12	40	43	21	47	42	22	43

Catatan:

*) Lain – lain: Wilayah selain 34 provinsi di Indonesia, dapat berupa negara lain.

Tabel 34

Jumlah HA Proaktif Berdasarkan Kategori Terlapor*)

Kategori Terlapor	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perorangan	172	143	202	17	16	11	49	6	10	31	36	19	43	31	18	39
Korporasi	24	60	63	4	6	3	3	3	2	9	7	2	4	11	4	4
Total	196	203	265	21	22	14	52	9	12	40	43	21	47	42	22	43

Catatan:

*) Pihak Terlapor dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Hasil Analisis sehingga jumlah pada Kategori Terlapor akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.



Sept
2022

Jumlah HP/IHP yang
disampaikan PPATK kepada
Penyidik/Stakeholders
1 HP/IHP

Jumlah PJK yang
diperiksa
21 PJK

Jumlah Rekening yang
diperiksa
38 Rekening

Penyampaian HP&IHP kepada Penyidik sejak 2011 s.d Sept 2022

KEPOLISIAN 54

KEJAKSAAN 43

KPK 78

BNN 12

DJP 20

DJBC 16

Hasil Pemeriksaan
maupun Informasi Hasil
Pemeriksaan (IHP) mulai
efektif disampaikan oleh
PPATK sejak Januari
Tahun 2011

UU No 8 Tahun 2010



Pasal 1 Angka 8

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2)

"PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan."

"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 90 Ayat (1)

"Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:

- instansi penegak hukum;
- lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
- financial intelligence unit negara lain."

Tabel 35

Jumlah Hasil Pemeriksaan yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik per Bulan*)

Penyidik	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kepolisian	8	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Kejaksaan	2	4	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Total	10	8	7	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1

Tabel 36

Jumlah Informasi Hasil Pemeriksaan (IHP) yang disampaikan oleh PPATK kepada Stakeholders per Bulan*)

Stakeholders	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
KPK	12	7	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
BNN	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DJP	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DJBC	1	2	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BI	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OJK	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemendagri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kemenkeu	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Lainnya	0	2	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Total	14	15	24	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	2	0

Catatan:

*) Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Informasi maupun Hasil Pemeriksaan kepada Stakeholders

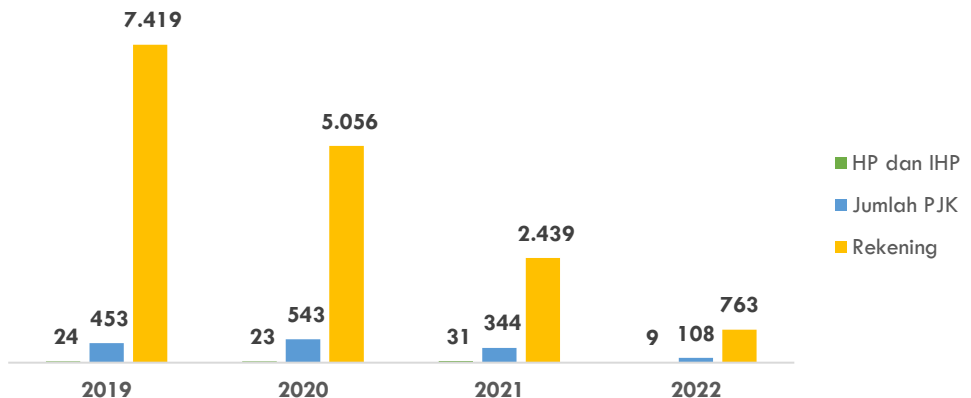
Tabel 37

Jumlah HP, PJK dan Rekening yang Diperiksa

Penyampaian	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
HP dan IHP	24	23	31	5	2	0	2	0	0	1	2	0	2	0	3	1
Penyedia Jasa Keuangan	453	543	344	121	14	0	24	0	0	4	43	0	12	0	28	21
Rekening	7.419	5.056	2.439	312	65	0	304	0	0	18	98	0	22	0	587	38

Grafik 16

Jumlah HP, PJK, dan Rekening yang Diperiksa 2019 s.d. Sept 2022





PERMINTAAN INFORMASI



TERKAIT HA

PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN



888 Permintaan

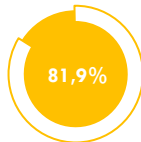


7.406 Permintaan

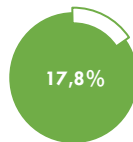


53.143 Total

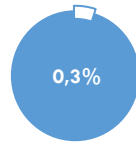
Jumlah permintaan informasi yang disampaikan kepada Pihak Pelapor Bank/Non-Bank/Regulator/Instansi lainnya dalam rangka mendukung penyusunan HA sejak **Januari 2010 s.d. Agustus 2022**



43.538 permintaan
Bank



9.451 permintaan
Non-Bank



154 permintaan
**Regulator/ Instansi
Lainnya**



UU No 8 Tahun 2010

Pasal 44 ayat (1) huruf a, b dan c

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;

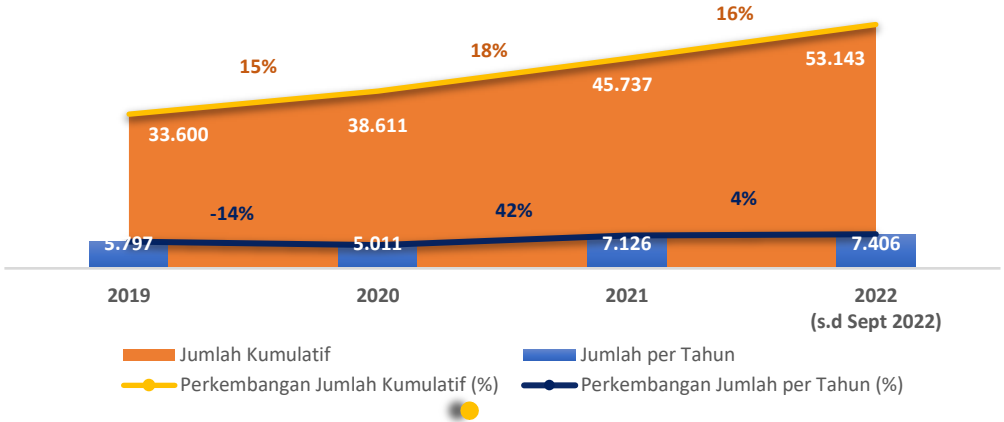
Tabel 38
Jumlah Permintaan Informasi kepada Bank, Non-Bank, dan Regulator/Instansi

Tujuan Permintaan Informasi	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Bank	4.849	4.041	5.424	281	176	319	429	676	654	561	893	117	390	776	716	752
Non-Bank	948	963	1.673	74	77	99	154	264	262	223	332	50	163	159	258	134
Regulator/Instansi	0	7	29	0	3	9	3	5	2	9	4	1	1	1	1	2
Total	5.797	5.011	7.126	355	256	427	586	945	918	793	1.229	168	554	936	975	888

Catatan:

*) Terdapat pengkinian data

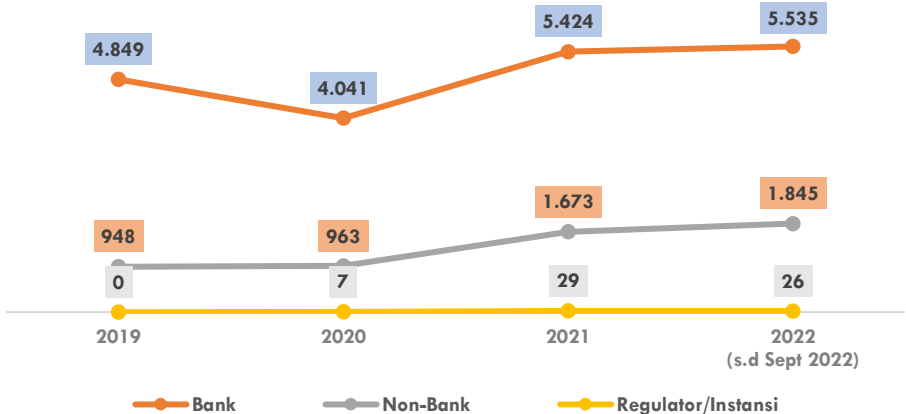
Grafik 17
Perkembangan Jumlah per Tahun dan Kumulatif
Permintaan Informasi kepada Bank/ Non-Bank/ Regulator/Instansi
2019 s.d Sept 2022



Catatan:

Total Kumulatif dihitung sejak tahun 2010

Grafik 18
Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi
kepada Bank/ Non-Bank/Regulator/Instansi
2019 s.d Sept 2022





Sept
2022

PPATK menerima
55 pengaduan

31 Individu
24 Lembaga

Pengaduan bulan ini
↑ **19,6%**
dibandingkan bulan
Ags 2022 (m-to-m)

Pengaduan bulan ini
↑ **1275%**
dibandingkan
bulan Sept 2021 (y-to-y)



Tahun 2022
(s.d Sept 2022)

PPATK menerima
228 pengaduan

127 Individu
101 Lembaga

Pengaduan Jan-Sept 2022
↑ **181,5%**
dibandingkan jumlah bulan Jan-Sept 2021
(c-to-c)



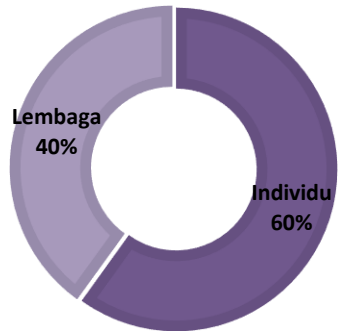
Tahun
2013-2022
(s.d Sept 2022)

PPATK menerima
1.201 pengaduan

718 Individu
483 Lembaga

100% telah ditindaklanjuti

Grafik 19
Distribusi Pengaduan Masyarakat
yang Disampaikan kepada PPATK
berdasarkan Jenis Pelapor
2013-2022 (s.d Sept 2022)



Tabel 39

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK Tahun 2019-2022 (s.d. Sept 2022)

Jenis Pelapor	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Individu	55	34	56	2	6	2	6	3	7	8	8	9	12	16	33	31
Lembaga	29	40	67	2	11	11	6	6	12	10	13	6	10	7	13	24
Jumlah	84	74	123	4	17	13	12	9	19	18	21	15	22	23	46	55

Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2019



Pasal 2

“PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang”

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU



Tahun 2022
(s.d Sept 2022)

Total putusan Pengadilan
perkara TPPU
78 putusan

Mayoritas putusan pengadilan
perkara TPPU **pada Tahun 2022**
(s.d Sept 2022): **Narkotika**
18 putusan



Perkara TPPU yang telah diputus oleh
Pengadilan sejak Januari 2005 (s.d.
September 2022*)

774

Sebagian besar putusan Pengadilan perkara TPPU
terkait dengan **tindak pidana asal Narkotika (208**
putusan atau **26,9%**).



Sebagian besar Putusan Pengadilan terkait TPPU diputus oleh
Pengadilan (mencakup Pengadilan Negeri/Tipikor, Pengadilan
Tinggi, dan atau Mahkamah Agung) di wilayah **DKI Jakarta**, yaitu
sebanyak **230 putusan (30,1%)**.



*) Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung

Pasal 69

UU No 8 Tahun 2010

Pasal 77

“Untuk dapat dilakukan penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tindak pidana
Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan
terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”



“Untuk kepentingan pemeriksaan di
sidang pengadilan, terdakwa wajib
membuktikan bahwa Harta
Kekayaannya bukan merupakan
hasil tindak pidana.”

Tabel 40**Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Provinsi***

Provinsi	2019	2020	2021	Jan s.d. Sept 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	10	36	32	17
Jawa Tengah	5	1	5	12
Jawa Timur	5	8	2	9
Jawa Barat	6	7	7	5
Sumatera Selatan	4	6	3	5
Kalimantan Barat	1	5	2	5
Kalimantan Selatan	3	1	4	5
Sulawesi Selatan	4	5	7	4
DI Yogyakarta	1	6	4	4
Banten	0	1	7	3
Lainnya	15	41	47	9
Jumlah	54	117	120	78

Tabel 41**Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal***

Tindak Pidana Asal	2019	2020	2021	Jan s.d. Sept 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Narkotika	20	42	38	18
Korupsi	6	25	12	15
Penipuan	16	22	27	13
Transfer Dana	0	7	4	5
Perbankan	1	5	6	5
Pencurian	0	0	4	4
Penggelapan	8	12	9	5
ITE	0	0	13	5
TP Perpajakan	0	1	0	2
Pemalsuan Surat	0	2	3	2
Tindak Pidana Lain	3	2	3	3
Cukai	0	0	0	1
Perjudian	0	0	1	0
Pemerasan	0	0	0	0
Pemalsuan Uang	0	0	0	0
Psikotropika	0	0	0	0
Lingkungan Hidup	0	0	0	0
Penyuapan	0	0	0	0
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	0	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Kelautan	0	0	0	0
Perasuransian	0	0	0	0
Jumlah	54	117	120	78

Tabel 42**Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan TPPU Menurut Pasal TPPU***

Pasal TPPU	Jan s.d. Sept 2022
(1)	(2)
Pasal 3	72
Pasal 4	0
Pasal 5	6
Jumlah	78

Catatan:

*) Terdapat update data statistik Putusan Pengadilan per tanggal 31 Agustus 2022

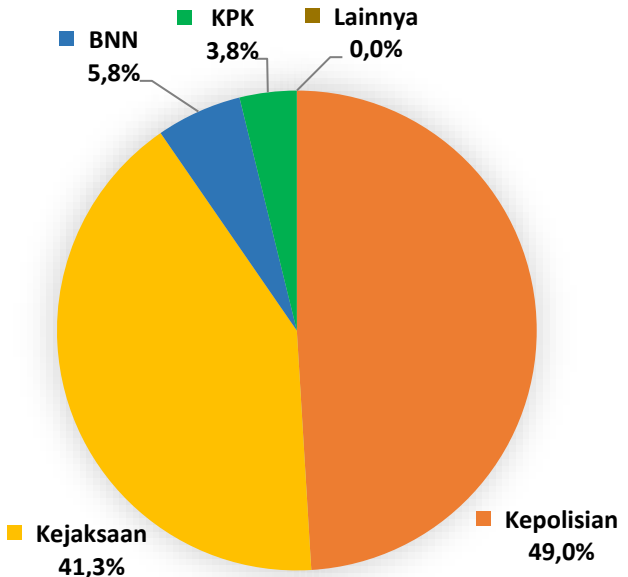
PEMENUHAN KETERANGAN AHLI



Dalam mendukung proses penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli.

 September 2022	Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli (PKA) oleh PPATK bulan ini 11	Jumlah PKA bulan ini 10% dibandingkan Ags 2022 (m-to-m)	Jumlah PKA bulan ini -21,4% dibandingkan Sept 2021 (y-to-y)	Mayoritas PKA bulan ini berasal dari Kepolisian. 45,5%
Tahun 2022	Jumlah PKA oleh PPATK Tahun 2022 (s.d. September 2022) 104	Jumlah PKA Jan-Sept 2022 -12,6% dibandingkan Jan-Sept 2021 (c-to-c)	Mayoritas PKA Tahun 2022 (s.d. September 2022) berasal dari Kepolisian. 49,0%	
Tahun 2008-2022	Jumlah PKA oleh PPATK Tahun 2008-2022 (s.d. September 2022) 1.784	Mayoritas PKA Tahun 2008-2022 (s.d. September 2022) berasal dari Kepolisian. 59,3%		

Grafik 20
Persentase Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Tahun 2022 (s.d. September 2022)

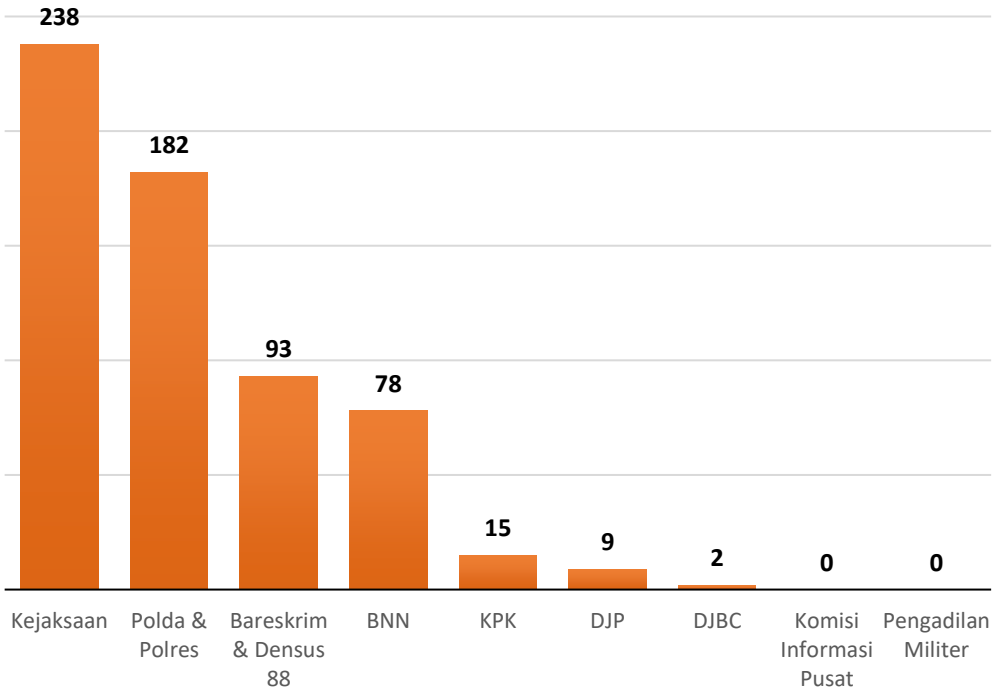


Berdasarkan data tahun 2022 (Jan s.d. September 2022), mayoritas permintaan keterangan ahli berasal dari **Kepolisian (Bareskrim, Densus 88, Polda, dan Polres).**

Tabel 43
Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPAK Berdasarkan Instansi Pemohon
Tahun 2019-2022 (s.d September 2022)

Instansi Pemohon	2019	2020	2021	2021					2022							
				Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kejaksaan	65	64	66	7	8	3	11	6	4	9	4	3	3	6	4	4
Polda & Polres	60	48	49	4	6	2	3	2	3	3	1	3	2	3	4	4
Bareskrim & Densus 88	17	20	30	3	0	6	1	5	2	1	4	5	4	2	2	1
BNN	35	24	13	0	0	3	2	0	1	1	1	1	0	0	0	2
KPK	3	4	4	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0
DJP	4	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DJBC	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komisi Informasi Pusat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadilan Militer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	184	162	167	14	14	16	18	14	10	14	10	14	9	12	10	11

Grafik 21
Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPAK Berdasarkan Instansi Pemohon
Tahun 2008-2022 (s.d September 2022)





PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN

AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PIHAK PELAPOR



17 audit
oleh PPATK

**September
2022**

4
PJK



13
PBJ



0
Profesi



61 audit
oleh PPATK

2022

17
PJK



41
PBJ



3
Profesi



Mencakup monitoring secara onsite yang dilakukan kepada Pihak Pelapor selama **tahun 2022 (s.d Sept 2022)**

**Tahun 2019-2022
(s.d Sept 2022)**



305 audit
oleh PPATK

77
PJK



218
PBJ



10
Profesi



**Akumulasi sejak
2005 :**

Jumlah keseluruhan pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK/PBJ/Profesi

1.506
audit



Pasal 43

"Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;"

**UU No 8
Tahun 2010**



Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK berwenang melakukan kegiatan **Audit Kepatuhan dan Audit Khusus** terhadap Pihak Pelapor, baik secara *off-site* maupun secara *on-site* kepada Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang/Jasa Lainnya.

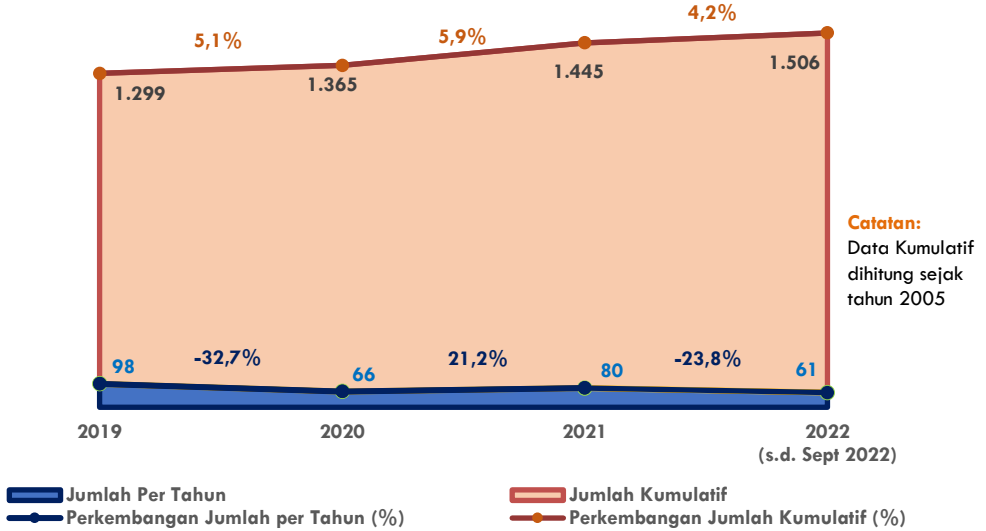
Tabel 44
Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor**

Jenis Pihak Pelapor	2021												2022			
	2019	2020	2021	Sept	Oktr	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penyedia Jasa Keuangan	23	17	20	3	2	5	0	0	0	5	1	2	1	1	3	4
Bank	7	8	8	3	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
Perusahaan Pembiayaan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Piakt	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusahaan Efek	0	3	3	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Manajer Investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasar Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kustodian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wali Amanat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perposan sebagai penyelenggara jasa gii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pedagang Valuta Asing	12	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggl	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wali	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koperasi yang melakukan kegiatan simpor	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Pegadain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusahaan yang bergerak di bidang per	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Penyelenggara kegiatan usaha pengirima	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Perusahaan modal ventura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga keuangan mikro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lembaga pembiayaan ekspor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyedia Barang dan Jasa	75	48	54	2	3	11	10	0	1	15	6	0	3	2	1	13
Perusahaan Properti	44	26	38	2	3	7	1	0	1	10	1	0	1	2	1	10
Pedagang Kendaraan Bermotor	31	18	13	0	0	4	9	0	0	5	4	0	0	0	0	3
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Balai Lelang	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Barang Seni/ Antik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profesi	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
Total	98	66	80	5	5	16	10	0	1	20	7	4	4	4	4	17

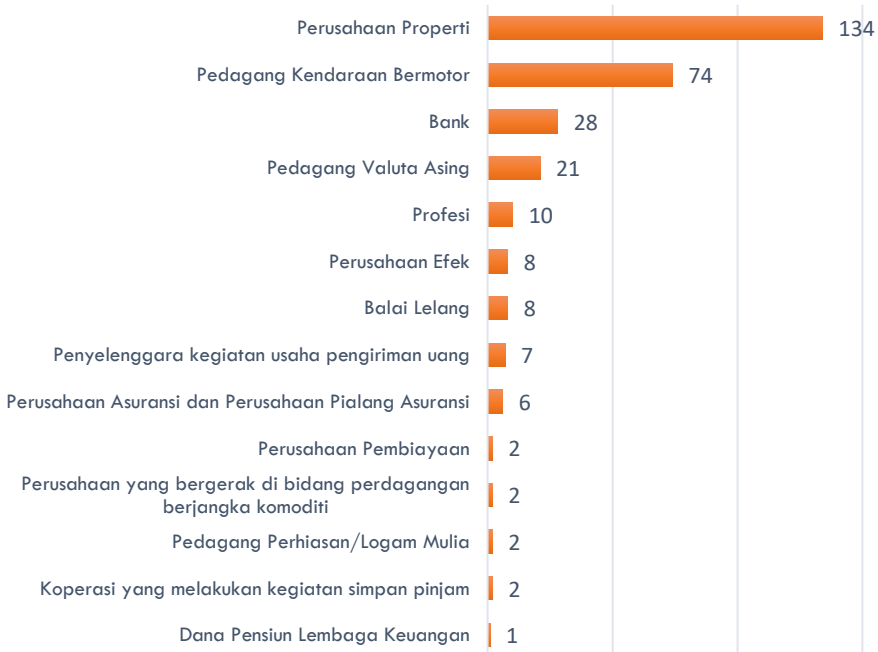
*) Mencakup audit kepatuhan onsite dan audit khusus/join audit

***) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

Grafik 22
Perkembangan Jumlah Per Tahun dan
Kumulatif Audit Pihak Pelapor
Tahun 2019-2022 (s.d Sept 2022)



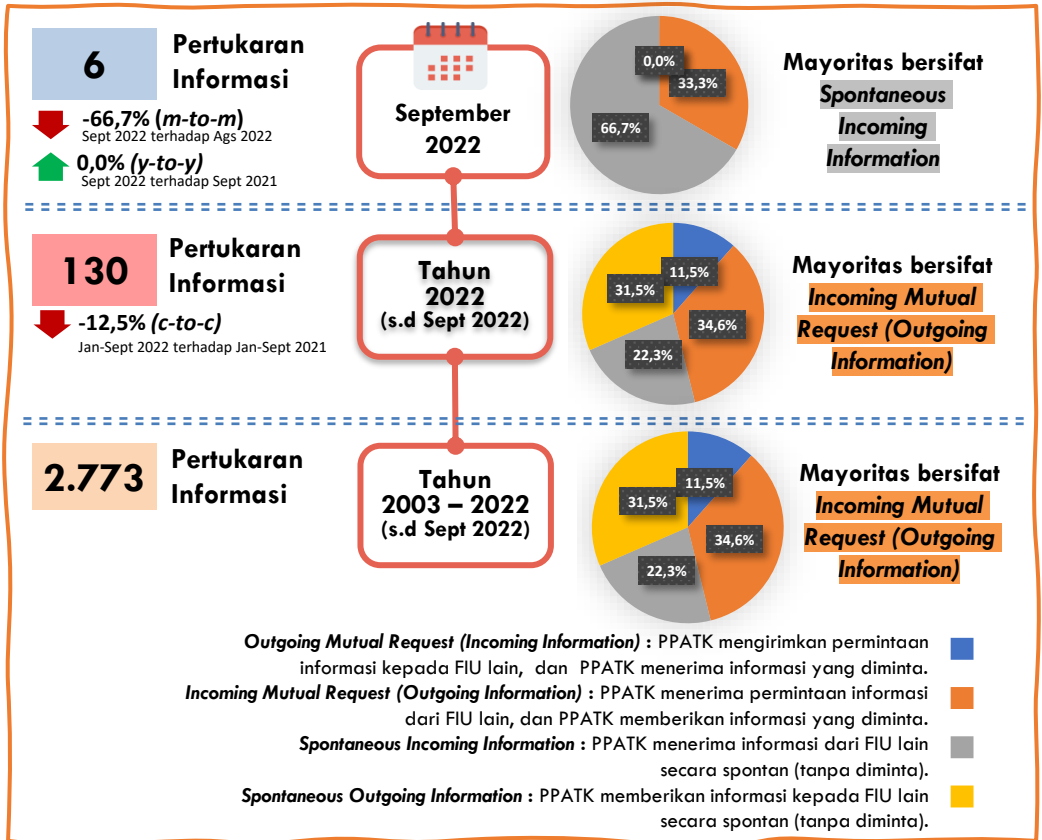
Grafik 23
Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan
Jenis Pihak Pelapor
Tahun 2019-2022 (s.d Sept 2022)



PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU



Sebagai bentuk kerja sama internasional, PPATK melakukan pertukaran informasi dengan berbagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* luar negeri.



Pasal 89 ayat (1) dan (2)

“Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.”

“Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Pasal 90 ayat (1)

“Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, ...”

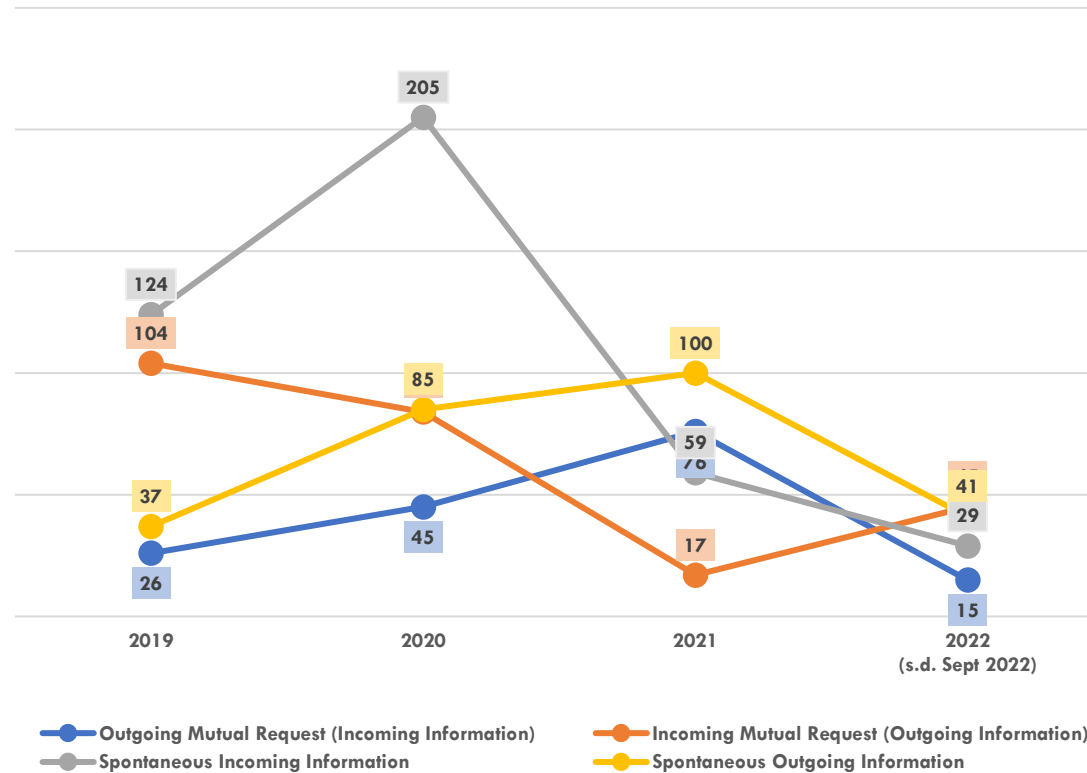


UU 8/2010

Tabel 45
Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2019-2022 (s.d September 2022)

Jenis Pertukaran Informasi	2019	2020	2021	2021				2022								
				Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)	26	45	76	2	0	4	16	1	1	1	6	0	0	2	4	0
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)	104	84	17	0	0	0	0	4	3	10	5	5	6	4	6	2
Spontaneous Incoming Information	124	205	59	3	11	4	8	5	4	6	1	0	2	2	5	4
Spontaneous Outgoing Information	37	85	100	1	2	3	12	0	0	6	0	13	3	16	3	0
Total	291	419	252	6	13	11	36	10	8	23	12	18	11	24	18	6

Grafik 24
Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2019-2022 (s.d September 2022)



NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

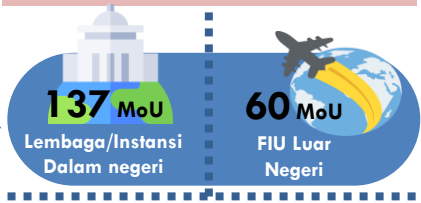


Sept
2022

Terdapat **2** penambahan penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada **September 2022**

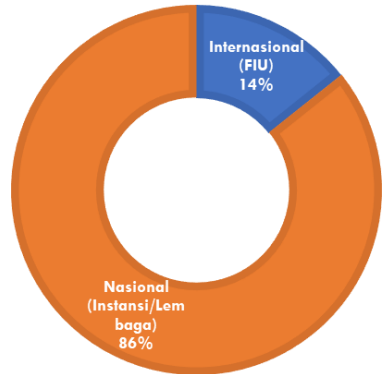
197

Penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman oleh PPATK sejak **Januari 2003 s.d September 2022**



Grafik 25

Persentase Kumulatif MoU yang Telah Ditandatangani antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga Tahun 2019 s.d. September 2022



Tabel 47

Jumlah MoU Berdasarkan Tahun Penandatanganan Antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga

FIU/Instansi	2019	2020	2021	2021					2022							
				Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Internasional (FIU)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nasional (Instansi/Lembaga)	6	5	11	0	3	0	5	2	0	2	0	0	1	0	1	2
Total	11	5	11	0	3	0	5	2	0	2	0	0	1	0	1	2

Pasal 88

- (1) Kerja sama nasional yang dilakukan PPATK dengan pihak yang terkait ditunjukkan dengan atau tanpa bentuk kerja sama formal.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang d Indonesia.

Pasal 90 ayat (1)

- “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi:
- a. instansi penegak hukum;
 - b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
 - c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
 - e. financial intelligence unit negara lain.”



**UU No 8
Tahun 2010**

Tabel 48

FIU Negara ASEAN yang telah Memiliki MoU dengan PPAK

Negara (FIU)	Penandatanganan Nota Kesepahaman	
	Tempat	Waktu
Thailand	Bangkok	24 Maret 2003
Malaysia	Malaysia	31 Juli 2003
Filipina	Brunei Darussalam	5 Oktober 2004
Vietnam	Jakarta	18 Agustus 2010
Myanmar	Jakarta	14 November 2006
Brunei Darussalam	Jakarta	17 Desember 2008
Singapura	Singapura	17 September 2013
	Jakarta	25 September 2013
Kamboja	Jakarta	22 September 2015
Laos	Bali	11 Agustus 2016

Tabel 49

**Lembaga/Instansi Domestik yang telah Memiliki MoU dengan PPAK
Tahun 2010 s.d. 2022 (s.d. Sept 2022)**

DALAM NEGERI		
No	Lembaga/Instansi	Tanggal Penandatanganan
Tahun 2010		
1	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	14 April 2010
2	Universitas Padjajaran	22 Juni 2010
3	Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik	7 Juli 2010
4	Universitas Mataram	27 Juli 2010
5	Universitas Syiah Kuala	8 Oktober 2010
6	Setjen Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK)	29 Desember 2010
Tahun 2011		
7	Kementerian Perhubungan RI	27 Januari 2011
8	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	18 April 2011
9	Universitas Pattimura	5 Mei 2011
10	Universitas Indonesia & Bank Indonesia (terkait pendirian Pusat Kajian TPPU di UI)	29 Juli 2011
11	Ombudsman RI	11 Agustus 2011
12	Universitas Sriwijaya	12 September 2011
13	Universitas Udayana	4 Oktober 2011
14	PT. Pertamina (Persero)	19 Oktober 2011
15	Universitas Bina Nusantara	19 Oktober 2011
Tahun 2012		
16	Universitas Esa Unggul	10 Januari 2012
17	Universitas Sumatera Utara	30 Januari 2012
18	Universitas Airlangga	28 Februari 2012
19	Itjen Kementerian Pekerjaan Umum	11 April 2012
20	Itjen Kementerian Hukum dan HAM	23 Oktober 2012
21	Universitas Lambung Mangkurat	5 November 2012
22	Universitas Cendrawasih	29 November 2012
23	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	3 Desember 2012
24	Satgas REDD	20 Desember 2012
25	NCB Interpol Indonesia	21 Desember 2012
26	Itjen Kementerian Agama	26 Desember 2012

Tabel 49
Lembaga/Instansi Domestik yang telah Memiliki MoU dengan PPAK
Tahun 2010 s.d. 2022 (s.d. Sept 2022) lanjutan

DALAM NEGERI		
No	Lembaga/Instansi	Tanggal Penandatanganan
Tahun 2013		
27	Setjen Mahkamah Konstitusi	7 Januari 2013
28	LPSE Kementerian Keuangan	5 Februari 2013
29	Sisminbakum DJAHU Kementerian Hukum & HAM	15 Februari 2013
30	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	18 Juni 2013
31	Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)	21 Juni 2013
32	Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI	30 Juli 2013
33	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati	27 Agustus 2013
34	Itjen Kemendikbud	30 September 2013
Tahun 2014		
35	Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil	30 Januari 2014
36	Keputusan Bersama antara PPAK dengan Bawaslu, KPU, KPK, dan KIP	4 April 2014
37	Komisi Pemilihan Umum	4 Februari 2014
38	Badan Pengawasan Obat Makanan	26 Mei 2014
39	PT. Indonesia Power	17 Oktober 2014
40	PT. PLN (persero)	19 November 2014
41	Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika	18 Desember 2014
Tahun 2015		
42	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5 Januari 2015
43	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	22 Januari 2015
44	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	12 Maret 2015
45	Kementerian Pemuda dan Olahraga	25 Maret 2015
46	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (SCTV, Indosiar dan Liputan6.com)	17 April 2015
47	Kementerian Kesehatan	30 April 2015
48	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	12 Mei 2015
49	Kementerian PPN/BAPPENAS	3 Juli 2015
50	Lembaga Sandi Negara	9 November 2015
Tahun 2016		
51	Kementerian Pertahanan	14 Maret 2016
52	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	2 Mei 2016
53	UIN Alauddin Makassar	15 Juli 2016
54	Badan Intelijen Negara	4 Agustus 2016
55	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	17 Oktober 2016
56	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan PPAK	24 Oktober 2016
Tahun 2017		
57	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	7 Maret 2017
58	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	12 April 2017
59	Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti)	2 Mei 2017
60	TNI Angkatan Udara	9 Mei 2017
61	Kementerian Perhubungan	9 Juni 2017
62	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	6 Juli 2017
63	Juknis dengan Ditjen Pajak	24 Agustus 2017
64	Universitas Jayabaya	26 September 2017
65	Universitas Brawijaya	4 Desember 2017

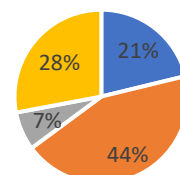
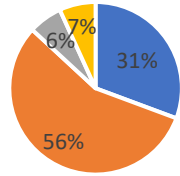
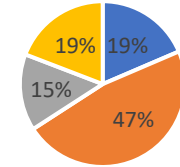
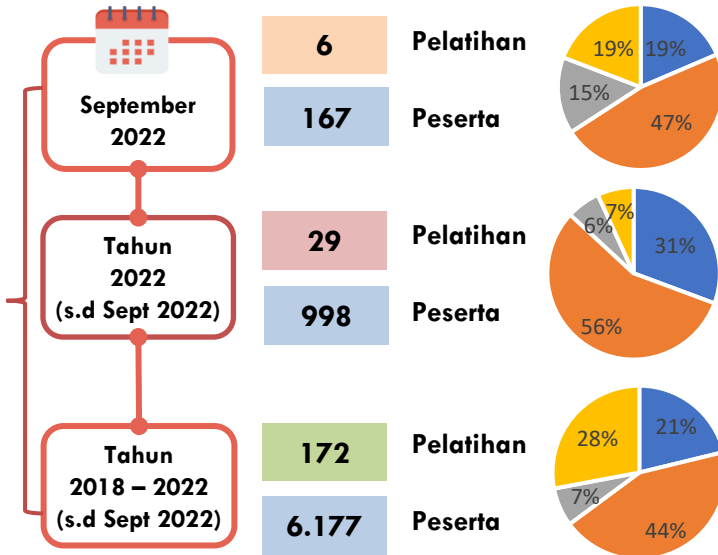
Tabel 49
Lembaga/Instansi Domestik yang telah Memiliki MoU dengan PPAK
Tahun 2010 s.d. 2022 (s.d. Sept 2022) lanjutan

DALAM NEGERI		
No	Lembaga/Instansi	Tanggal Penandatanganan
Tahun 2018		
66	Satgas Waspada Investasi	18 Mei 2018
67	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM	30 Mei 2018
68	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	3 Oktober 2018
69	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan	4 Oktober 2018
70	Perpustakaan Nasional RI	12 November 2018
71	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	15 November 2018
72	Universitas Surabaya	26 November 2018
Tahun 2019		
73	Satgas Umrah	8 Februari 2019
74	Kementerian BUMN	14 Februari 2019
75	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	8 Mei 2019
76	Universitas Diponegoro	27 Mei 2019
77	Badan Pusat Statistik	24 Juni 2019
78	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Oktober 2019
Tahun 2020		
79	Arsip Nasional Republik Indonesia	31 Januari 2020
80	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	13 Februari 2020
81	Badan Standarisasi Nasional	1 Juni 2020
82	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	1 September 2020
83	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	8 September 2020
Tahun 2021		
84	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	12 Maret 2021
85	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN)	22 April 2021
86	Komisi Yudisial (KS)	09 Juni 2021
87	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	8 Oktober 2021
88	Badan Amil Zakat Nasional	11 Oktober 2021
89	Kementerian Keuangan	22 Oktober 2021
90	Pusat Kesehatan Masyarakat Gambir	8 Desember 2021
91	RSUD Tarakan	8 Desember 2021
92	RS Siloam	8 Desember 2021
93	Universitas Sebelas Maret (UNS)	20 Desember 2021
94	Kemenkeu, BI dan OJK	30 Desember 2021
Tahun 2022		
95	Setjen KY	12 Januari 2022
96	Universitas Jember (UNEJ)	22 Januari 2022
97	Universitas Trisakti	4 Maret 2022
98	Universitas Andalas	7 Maret 2022
99	Bank Tabungan Negara	3 Juni 2022
100	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	19 Agustus 2022
101	Pegadaian	13 September 2022
102	Bareskrim Polri	29 September 2022

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT



Pelatihan



Grafik perbandingan jumlah peserta

- Apgakum
- Pihak Pelapor
- LPP
- Internal PPATK



Seminar/Webinar

8 seminar/webinar dengan total peserta **3018** sejak tahun **2021 s.d September 2022**

UU No 8 Tahun 2010



Pasal 40 huruf a

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

Penyelenggaraan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT

Tabel 49
Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 (s.d Sept 2022)

Pemangku Kepentingan	Jumlah Penyelenggaraan	2022 (s.d Sept 2022)
Apgakum	10	306
Pihak Pelapor	15	561
LPP	2	63
Internal PPAK	2	68
Total	29	998

Tabel 50
Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan
Tahun 2018 - 2022 (s.d Sept 2022)

Pemangku Kepentingan	2018		2019		2020		2021		2022		Total	
	Pel	Pes	Pel	Pes	Pel	Pes	Pel	Pes	Pel	Pes	Pel	Pes
Apgakum	3	137	14	404	4	193	9	270	10	306	40	1310
Pihak Pelapor	17	713	9	232	19	464	19	727	15	561	79	2697
LPP	0	0	2	49	2	55	4	276	2	63	10	443
Internal PPAK	5	134	16	960	5	141	15	424	2	68	43	1727
Total	25	984	41	1645	30	853	47	1697	29	998	172	6177

*Pel : Jumlah penyelenggaraan pelatihan

*Pes: Jumlah peserta

Tabel 51
Penyelenggaraan Seminar/Webinar Tahun 2021 – 2022 (s.d Sept 2022)

Tahun	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Peserta
2021	5	1697
2022	3	1321
Total	7	3018



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No.35 Jakarta Pusat | www.ppatk.go.id